



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PERBANDINGAN PENGHEMATAN PAJAK DALAM PEROLEHAN ASET TETAP MELALUI ALTERNATIF PEMBIAYAAN SECARA TUNAI, KREDIT BANK, DAN LEASING PADA PT. "X"

SKRIPSI



**LALA AMALIA
0810532082**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa :

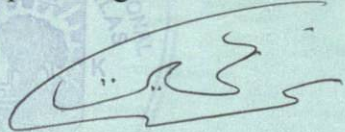
Nama : **LALA AMALIA**
No. BP : 0810532082
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : **Analisis Perbandingan Penghematan Pajak
Dalam Perolehan Aset Tetap Melalui Alternatif
Pembiayaan Secara Tunai, Kredit bank, dan
Leasing Pada "PT. X"**

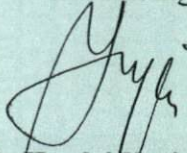
Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 20 Oktober 2014 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Padang, 20 Desember 2014

Kepala Program Studi Akuntansi

Pembimbing


Verni Juita, SE, CA, Ak, M.Com (Adv)
NIP.197906182002122004


Dr. Yulia Hendri Veni, SE, MT, Ak
NIP. 196407021990012001

	No Alumni Universitas	LALA AMALIA	No Alumni Fakultas
	<p style="text-align: center;">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir : Padang / 17 Agustus 1990 b). Nama Orang Tua : Djadjat Sutardja dan Ledyana c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 0810532082 f). Tanggal Lulus : 15 Desember 2014 g). Predikat lulus : Memuaskan h). IPK : 3,09 i). Lama Studi : 6 Tahun 3 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jln. Suliki no. 3 A Padang</p>		

The Comparison Analysis of Tax Saving in Acquisition of Fixed Assets Through Alternative Financing in Cash, Bank Credit, and Leasing in PT. "X"

Skripsi Oleh Lala Amalia

Pembimbing Skripsi Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, MT, Ak

ABSTRACT

This research has a purpose to identify and analyze the implementation of tax planning in selecting the most profitable financing alternative in acquisition of fixed assets for the company between cash, credit bank, and leasing. The research was conducted in PT "X" which is engaged in civil construction in 2014. Descriptive case studies used for this research method. This study used primary and secondary data. The result of this study proves that the financing alternative through leasing is the most profitable alternative for the tax savings obtained by the company for this alternative is higher than alternative financing through bank loans and financing in cash. Based on the conclusion is advised to choose an alternative financing through leasing that brings highest tax saving.

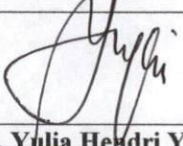

Keywords: *Tax Planning, Tax Saving, Fixed Assets, Cash, Bank Credit, and Leasing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam memilih alternatif pembiayaan aset tetap yang paling menguntungkan bagi perusahaan antara tunai, kredit bank, dan *leasing*. Penelitian dilakukan pada PT. "X" yang bergerak di bidang konstruksi sipil pada tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa alternatif pembiayaan melalui sewa guna usaha (*leasing*) merupakan alternatif yang paling menguntungkan karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan untuk alternatif ini lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif pembiayaan melalui tunai dan kredit bank. Berdasarkan kesimpulan maka disarankan untuk memilih alternatif pembiayaan melalui *leasing* agar mendapatkan penghematan pajak yang lebih tinggi.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak, Aset Tetap, Tunai, Kredit Bank, Dan Sewa Guna Usaha

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, MT, Ak	Drs. Riwayadi, MBA, Ak, CSRS CA.

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi: **Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak**
NIP. 19720502 1996021001

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Perbandingan Penghematan Pajak Dalam Perolehan Aset Tetap Melalui Alternatif Pembiayaan Secara Tunai, Kredit Bank, dan *Leasing* Pada PT. "X"** merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 20 Desember 2014

Yang memberi pernyataan,



Lala Amalia

0810532082

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai, membimbing, dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Analisis Perbandingan Penghematan Pajak Dalam Perolehan Aset Tetap Melalui Alternatif Pembiayaan Secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing Pada PT. "X"**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi:

1. Bapak Prof. Tafdil Husni, SE, MBA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memfasilitasi dari tahap penulisan proposal hingga pelaksanaan ujian skripsi.
3. Ibu Verni Juita, SE, CA, Ak, M.Com (Adv) selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1.
4. Ibu Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, MT, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

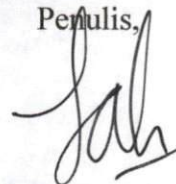
5. Bapak Drs. Riwayadi, MBA, Ak, CSRS, CA yang telah berkenan sebagai penguji skripsi dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtua tercinta Bapak Djadjat Sutardja dan Ibu Ledyana, kakak-kakak tercinta Lellyana, Hendra jaya, Dharma Yudha, dan Yulianti yang telah banyak memberikan dorongan serta dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Jajaran Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Pegawai Biro Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Da Ari dan Ni Eva) serta pegawai ICT yang telah memberikan bantuan, kemudahan, dan kelancaran dalam urusan administrasi akademis penulis selama perkuliahan.
10. Kodoknya dedek Muhammad Fariz Anugraha Yahdi yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat penulis Jessica Angela, Syska Ramonda, Monica Olivia, Putri Grenstiviani, Putri Retno, Septhiavani Habe, Mike Yolanda, Shyntia Delina, Siska Maya Sari, Muthia Lukman, Dhini Denisa atas dukungan dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh keluarga besar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terutama angkatan 2008 atas bantuan dan dukungan dalam proses perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak lainnya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dengan segala keterbatasan yang penulis miliki. Penulis menerima kritikan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu.

Padang, 20 Desember 2014

Penulis,



Lala Amalia
0810532082

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Tinjauan Teori	7
2.1.1. Pajak Secara Umum	7
2.1.1.1. Definisi Pajak	7
2.1.1.2. Unsur Pajak	8
2.1.1.3. Jenis Pajak	9
2.1.1.4. Fungsi Pajak	10
2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak	12
2.1.2. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	13
2.1.3. Strategi Untuk Mengefisienkan Beban Pajak	14
2.1.4. Aset Tetap	17
2.1.4.1. Definisi Aset Tetap	17

2.1.4.2. Pembagian Aset Tetap	18
2.1.4.3. Cara Perolehan Aset Tetap	21
2.1.5. Metode Penyusutan Aset Tetap Menurut Perpajakan...	23
2.1.6. Pembiayaan Melalui Alternatif Pembiayaan Tunai, Kredit Bank dan <i>Leasing</i>	35
2.1.6.1. Pembiayaan Secara Tunai	35
2.1.6.2. Pembiayaan Secara Kredit Bank	36
2.1.6.3. Pembiayaan Secara <i>Leasing</i>	43
2.1.7. Dampak atau Pengaruh Biaya yang dapat dikurangkan antara Tunai, Kredit Bank, dan Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>)	48
2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian	54
3.2. Metode Pengumpulan Data	54
3.3. Metode Analisis	56
3.4. Kerangka Pemikiran	58
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran umum PT."X"	59
4.1.1. Sejarah Perusahaan	59
4.1.2. Tujuan Perusahaan	60
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	60
4.2. Deskripsi Data.....	64

4.2.1. Prosedur untuk Transaksi Pembiayaan Secara Tunai ...	64
4.2.2. Prosedur untuk Transaksi Pembiayaan Secara Kredit Bank	66
4.2.3. Prosedur untuk Transaksi Pembiayaan secara Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	73
4.3. Deskripsi Data yang Digunakan Dalam Melakukan Perbandingan Penghematan Pajak	79
4.4. Analisis Hasil Pembahasan	81
4.4.1. Pembiayaan Aset Tetap Secara Langsung/Tunai	81
4.4.2. Pembiayaan Aset Tetap Melalui Kredit Bank	82
4.4.3. Pembiayaan Aset Tetap melalui Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	88
4.4.4. Analisis Alternatif Pembiayaan yang Sebaiknya Dipilih Perusahaan dalam Menghemat Pajak	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	99
5.2. Implikasi	100
5.3. Keterbatasan Penelitian	101
5.4. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan	25
Tabel 2.2	Harta Berwujud Kelompok Bangunan	25
Tabel 2.3	Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 1	26
Tabel 2.4	Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 2	27
Tabel 2.5	Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 3	30
Tabel 2.6	Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 4	32
Tabel 2.7	Contoh Perhitungan Penyusutan Metode Saldo Menurun	34
Tabel 2.8	Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap	35
Tabel 2.9	Dampak atau Pengaruh Biaya yang Dapat Dikurangkan Antara Tunai, Kredit Bank, dan Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>) menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia.	49
Tabel 4.1	Deskripsi Data yang Digunakan Perusahaan dalam Melakukan Perbandingan Penghematan Pajak	80
Tabel 4.2	Biaya Administrasi Kredit Bank	85
Tabel 4.3	Jumlah Biaya yang Dibebankan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak	86
Tabel 4.4	Biaya Administrasi Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	89
Tabel 4.5	Jumlah Biaya yang Dibebankan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak	91
Tabel 4.6	Jumlah Biaya yang Dibebankan Setiap Alternatif Pembiayaan Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak	94

Tabel 4.7	Perbandingan Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan Dalam Pembiayaan Secara Tunai, Kredit Bank, dan <i>Leasing</i>	96
Tabel 4.8	Perbandingan penghematan pajak didalam pembiayaan secara Tunai, Kredit Bank, dan <i>Leasing</i>	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. “X”	61
Gambar 4. 2 Prosedur Transaksi Pembiayaan Secara Tunai	65
Gambar 4. 3 Prosedur Transaksi Pembiayaan Melalui Kredit Bank	68
Gambar 4. 4 Prosedur Transaksi Pembiayaan melalui <i>Leasing</i>	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biaya Penyusutan Kendaraan Satu Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara tunai.	103
Lampiran 2	Biaya Penyusutan Kendaraan Satu Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara Kredit Bank.	104
Lampiran 3	Biaya Penyusutan Kendaraan Satu Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara <i>Leasing</i>	105
Lampiran 4	Skedul Pembayaran Pinjaman Kendaraan Satu Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment.	106
Lampiran 5	Skedul Pembayaran Sewa Guna Usaha Kendaraan Satu Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment.	107
Lampiran 6	Dampak atau Pengaruh Biaya yang Dapat Dikurangkan Serta Penghematan Pajak yang Diperoleh “PT. X” Untuk Alternatif Pembelian Kendaraan Satu Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara Tunai.	108
Lampiran 7	Dampak atau Pengaruh Biaya yang Dapat Dikurangkan Serta Penghematan Pajak yang Diperoleh “PT. X” Untuk Alternatif Pembelian Kendaraan Satu Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara Kredit Bank.	109
Lampiran 8	Dampak atau Pengaruh Biaya yang Dapat Dikurangkan Serta Penghematan Pajak yang Diperoleh “PT. X” Untuk Alternatif	

Pembelian Kendaraan Satu Unit Bulldozer Komatsu D85-SS

Heavy Equipment Secara *Leasing* 110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan serta memperoleh laba maksimum. Semakin besar laba perusahaan akan mengakibatkan peningkatan pajak yang terutang sehingga laba maksimum tidak akan diperoleh jika perusahaan memiliki beban pajak yang besar. Pajak merupakan sebuah beban bagi perusahaan yang harus ditekan karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba, dalam hal ini mengurangi laba bersih suatu perusahaan dalam melakukan praktek bisnis. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat strategi-strategi tertentu yang merupakan bagian dari perencanaan pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba bersih perusahaan.

Perencanaan pajak merupakan suatu upaya penghematan dalam membayar pajak agar beban pajaknya berada dalam jumlah serendah mungkin dalam batas yang tidak melanggar aturan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan. Salah satu perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan adalah pengelolaan tentang perolehan aset tetap sebagai modal operasi perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan alternatif pembiayaan mana yang paling menguntungkan agar dapat meminimalisasi pengeluaran perusahaan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat semakin meningkat. Beberapa alternatif

pembiayaan aset tetap sebagai modal operasi perusahaan antara lain adalah pembiayaan secara tunai, kredit bank, *leasing* (Pohan, 2013).

Pembiayaan secara tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembiayaan secara tunai dilakukan untuk pembelian peralatan atau barang modal yang nilai harga perolehannya tidak terlalu besar. Pembiayaan secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum sehingga tidak mengganggu posisi kas yang digunakan untuk biaya operasional jangka pendek.

Pembiayaan secara kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2011). Pinjaman secara kredit tersebut biasanya memerlukan adanya jaminan yang berbentuk harga tetap, barang bergerak, ataupun surat berharga. Tanggung jawab pengguna kredit sepenuhnya dipegang oleh peminjam kredit (debitur) dan segala bentuk transaksinya dilakukan untuk dan atas nama debitur tersebut. Sehingga dalam peminjaman kredit tersebut pemberi kredit biasanya tidak melakukan pengawasan langsung atas penggunaan dana kredit oleh debitur.

Pembiayaan secara *leasing* menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes, menjabarkan perusahaan sewa guna usaha (*leasing*

company) sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pada *finance lease*, penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa (*residual value*) yang disepakati bersama. Sedangkan pada *operating lease*, penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. *Leasing* merupakan suatu alternatif baru yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah kekurangan dana. Sumber pendanaan ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah prosedur yang ditawarkan relatif mudah dan fleksibel, sehingga memudahkan perusahaan untuk memperoleh barang modal (Hariyani, 2011).

Pembiayaan secara tunai, jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah biaya penyusutannya yang ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Pembiayaan melalui kredit, jumlah yang boleh dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk penyelesaian administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan oleh masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, *leasing* dianggap dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya

penghematan pajak pada *leasing* dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh *lease fee*, biaya administrasi, biaya penyusutan sebesar nilai opsi.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan perencanaan pajak dalam menentukan keputusan pembiayaan yang mempunyai penghematan pajak terbesar pada PT."X". PT."X" bergerak di bidang konstruksi sipil yang ingin melihat alternatif pembiayaan mana yang dianggap paling menguntungkan bagi perusahaan terkait dengan konsekuensi perpajakan antara pembiayaan secara tunai, kredit bank, dan *leasing*.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diambil rumusan masalah skripsi yang disusun ini adalah: Alternatif pembiayaan manakah yang dapat menghemat pajak dalam membeli aset tetap sebagai barang modal operasional melalui pembiayaan secara tunai, kredit bank, atau *leasing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alternatif sumber pembiayaan yang paling menguntungkan dalam penghematan pajak perusahaan antara pembiayaan tunai, kredit bank, dan *leasing*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan yang telah diperoleh saat kuliah dan membandingkan antara teori-teori yang diterima saat kuliah dengan dunia nyata melalui pengaplikasian teori-teori dalam dunia kerja.

2. Bagi perusahaan

Membantu perusahaan menganalisis alternatif pembiayaan mana yang menguntungkan ditinjau dari aspek perpajakan.

3. Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna dalam aktivitas usaha dan bisnis serta diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pada penelitian selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini diuraikan dalam lima bab. Masing-masing bab akan dijabarkan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang ingin diberikan, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II LANDASAN TEORI: Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori sebagai dasar dari penelitian yang meliputi strategi untuk mengefisienkan beban pajak, aset tetap, pemenuhan kebutuhan dana melalui alternatif pembiayaan secara tunai, pinjaman (kredit), dan *leasing*, perbedaan

antara pembiayaan tunai, kredit, dan *leasing*, dampak atau pengaruh biaya yang dapat dikurangkan antara tunai, kredit bank, dan sewa guna usaha (*leasing*), kajian penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini memberikan penjelasan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data, unit analisis serta teknik analisis data.
4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai sejarah dan tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta deskripsi mengenai hasil penelitian, analisis dan pembahasan mengenai penghematan pajak terbesar dan perhitungan pajak penghasilan.
5. BAB V PENUTUP: Pada bagian terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman atau intisari dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran yang merupakan gagasan pemecahan masalah yang diharapkan dapat berguna bagi pimpinan perusahaan pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pajak Secara Umum

2.1.1.1. Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara sehingga diperlukan peraturan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang penting dalam penerimaan negara. Dari segi sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat, yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat sendiri (Waluyo, 2011).

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan fasilitas publik negara.

2.1.1.2. Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain (Mardiasmo, 2011):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditujukan secara langsung
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (fungsi mengatur atau regulatif).

2.1.1.3. Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi dua dari segi lembaga pemungutnya, yaitu (Mardiasmo, 2011):

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Terdiri dari:
 - a. Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan
 - d. Bea Materai.
2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah:

1. Pajak provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak kabupaten atau kota:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan

- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan termasuk pembangunan di daerah (dalam bentuk dana perimbangan). Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Mardiasmo, 2011):

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara dan juga pendapatan daerah, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara maupun daerah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin dan melaksanakan pembangunan membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini harus ditingkatkan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah pusat memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi retribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai kepentingan umum sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding system*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak (Sumarsan, 2014).

2.1.2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tujuan dari perencanaan pajak adalah melakukan rekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan.

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk mengalami pengecualian atau pengurangan jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu,

perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.

3. Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*) (Suandy 2008).

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan:

1. Perbedaan tarif pajak
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak

2.1.3. Strategi Untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Dalam menyusun perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan maka strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang harus dilakukan oleh perusahaan haruslah yang bersifat legal supaya dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan undang-

undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak antara lain:

1. Mengambil keuntungan dan pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.
Bila dilihat dari segi perpajakan bentuk usaha perseorangan, firma, dan kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan daripada Perseroan Terbatas (PT). Pada PT yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dan 25% akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau seminimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Seperti biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hal ini tergantung kepada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara

masing-masing badan usaha. Hal ini bisa dilakukan mengingat banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antar corporate tidak dikenakan pajak. Contohnya seperti PT.X pabrik CPO, PT.Y pabrik minyak goreng, dan PT.Z adalah distributornya, maka antar mereka dapat diatur sejumlah keuntungan yang sekiranya dapat meringankan pajak mereka. Setelah itu laba baru dibagikan dalam bentuk dividen.

4. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dari beberapa Wajib Pajak di dalam satu grup begitu saja terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak yakni menghindari tarif pajak tinggi. Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang berlaku progresif dan Penghasilan Kena Pajak sudah melewati lapisan tarif terendah.
5. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi di samping pembelian langsung dengan jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian aset tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian secara langsung.
6. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi

belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya (Pohan, 2013).

2.1.4. Aset Tetap

2.1.4.1. Definisi Aset Tetap

Menurut PSAK No.16 tentang Aset Tetap dan Aset Lain-lain, pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Masa manfaat aset tetap adalah masa produksi yang diharapkan dari aset yang digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset perusahaan.

Aset tetap meliputi aset yang tidak dapat disusutkan (*nondepreciable*) seperti tanah, dan aset yang dapat disusutkan (*depreciable*) seperti mesin, bangunan, peralatan lainnya. Aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan harga perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan.

Aset tetap merupakan sumber-sumber ekonomi yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, meliputi

tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan-peralatan, serta sumber-sumber alam. Aset tetap merupakan salah satu bentuk kekayaan perusahaan yang berupa sumber ekonomi untuk menciptakan pendapatan. Aset tetap tersebut keberadaannya sangat diperlukan karena sebagai syarat mutlak untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.1.4.2. Pembagian Aset Tetap

Aset tetap menurut wujudnya terdiri dari dua yaitu aset tetap berwujud (*tangible fixed asset*) dan aset tidak berwujud (*intangible fixed asset*). Aset tetap berwujud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset tetap yang disusutkan (*depreciable fixed assets*)

Contoh: Komputer, mobil, bangunan, mesin, peralatan kantor dan aset yang lain.

- Aset tetap yang tidak disusutkan (*nondepreciable fixed assets*)

Contoh: Tanah, akan tetapi tanah untuk pertambangan, perikanan, dilakukan penyusutan dan istilahnya adalah deplesi (*depletion*).

Aset tetap tak berwujud (*intangible fixed asset*) merupakan aset tetap yang secara fisik tidak dapat dilihat, akan tetapi memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan. Berikut adalah contoh-contoh Aset tetap tak berwujud yang ditemui dalam dunia usaha:

- **Organization Cost**

Adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang terjadi sehubungan dengan set-up perusahaan sebelum beroperasi, contohnya pembayaran kepada notaris.

Pengeluaran ini diakui sebagai perolehan aset tak berwujud, karena pengeluaran tersebut perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih satu tahun buku. Contoh: Akte Pendirian Perusahaan.

- **Perizinan (*License*)**

Perizinan adalah hak perusahaan yang diperoleh dari pihak pemerintah baik daerah maupun pusat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu dengan bidang usahanya. Izin-izin perusahaan tentu ada jangka waktunya dan jika masa berlakunya telah habis maka izin tersebut harus diperpanjang atau diperbaharui. Namun demikian izin usaha atau aktivitas tertentu atas terkait dengan usaha biasanya memiliki jangka waktu 3 sampai 30 tahun, artinya lebih dari satu tahun buku. Untuk itu izin diakui sebagai aset tetap tak berwujud. Contoh: Surat Ijin Usaha, Tanda Daftar perusahaan, Surat ijin usaha jasa konstruksi dan sebagainya.

- **Hak Paten**

Hak paten adalah hak yang diperoleh atas suatu penemuan tertentu. Dimana atas penemuan tersebut, penemu akan memperoleh manfaat tertentu untuk kurun waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Penemuan tersebut bisa berupa suatu produk, atau rekayasa, atau formula, atau system, atau cara tertentu.

- **Merek Dagang (*Trade Mark*)**

Merek Dagang (*Trade Mark*) yang biasa disingkat TM, adalah hak yang diperoleh atas suatu merek komersial tertentu. Hak ini bisa berupa logo, tulisan, bentuk, simbol, atau kombinasinya, yang mewakili suatu

organisasi/perusahaan tertentu. Contoh: Logo, warna, dan bentuk *Kentucky Fried Chicken*.

- **Hak Penggandaan (*Copyright*)**

Copyright adalah hak yang diberikan atas suatu penulisan, baik itu berupa karya ilmiah, puisi, novel, maupun lirik lagu, notasi lagu/irama tertentu, script atau scenario film tertentu. *Copyright* meliputi hak untuk memperbanyak dan mengedarkannya.

- ***Franchise***

Adalah hak yang diperoleh untuk melakukan suatu usaha tertentu, atau memasarkan produknya, sekaligus mengikuti pola usaha, cara pengelolaan, penggunaan logo maupun penggunaan alat usaha tertentu yang aslinya dimiliki oleh perusahaan yang memberikan hak franchise. Contoh: Hak *Franchise Kentucky Fried Chicken, The British Institute*, Bimbingan Belajar Primagama.

- **Goodwill**

Adalah kelebihan-kelebihan, keistimewaan tertentu yang dimiliki oleh perusahaan, yang dinilai lebih oleh pihak lain. Kelebihan/keistimewaan tersebut bisa karena perusahaan memiliki reputasi manajemen yang sangat bagus, menghasilkan suatu produk unggul yang sulit dicari pesaingnya, letaknya strategis, dan lain-lain.

Goodwill hanya diakui (dibuatkan perkiraan) jika terjadi suatu transaksi, yang mana dalam transaksi tersebut perusahaan dinilai lebih oleh pihak lain. Transaksi yang dimaksudkan bisa berupa penjualan perusahaan,

bergabung/berhentinya sekutu (anggota persero) baru, merger atau akuisisi (Sumarsan, 2014).

2.1.4.3. Cara Perolehan Aset Tetap

Perolehan aset tetap diakui sebesar harga perolehannya (*historical cost*) ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang timbul mulai dari proses pembelian hingga aset tersebut siap dioperasikan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN Masukan tak boleh dikreditkan, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya persiapan tempat
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling costs*)
3. Biaya pemasangan (*installation costs*)
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.

Maka harga perolehan dapat dirumuskan dengan:

$$\text{Nilai Aset Tetap} = \text{Nilai Beli} + \text{Pengeluaran}$$

Aset dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti:

1. Perolehan aset dengan tunai (kas)

Perusahaan membeli aset tetap dengan melakukan pembayaran tunai kepada pemasok, sehingga nilai yang dibukukan perusahaan adalah besarnya nilai yang dibayar perusahaan ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menginstalasi aset tersebut sehingga dapat digunakan untuk operasional perusahaan.

2. Perolehan aset dengan kredit

Perusahaan membeli aset tetap dengan melakukan pembayaran kredit kepada pemasok. Cara pembayaran kredit bisa dilakukan dengan penerbitan giro mundur atau penagih (*collector*) dan pemasok yang akan menagih saat jatuh tempo. Nilai yang dibukukan perusahaan adalah besarnya nilai yang dibayar perusahaan ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran untuk menginstalasi aset tersebut sehingga dapat digunakan untuk operasional perusahaan.

3. Perolehan dengan sewa guna usaha (*leasing*)

Perolehan aset melalui sewa guna usaha, tentu pengeluaran kas tidak akan terjadi sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*), dan akan ada bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sewa guna usaha ini memiliki dua jenis, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi.

4. Perolehan aset dengan cicilan (*Installment Payment*)

Perolehan aset dengan pembayaran dicicil, tentu pengeluaran kas tidak akan terjadi sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan kesepakatan dengan kreditur (Bank), dan akan ada bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan.

5. Perolehan dengan pertukaran

Aset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau dengan pertukaran sebagian untuk aset tetap yang tidak serupa atau aset lain. Dalam praktek bisnis sehari-hari terjadi pertukaran aset tetap yang sejenis, seperti pertukaran mesin lama dengan mesin baru, tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Sedangkan transaksi pertukaran aset tetap yang tidak sejenis dapat diakui adanya laba atau rugi.

6. Perolehan dengan membangun sendiri

Aset tetap dapat dibangun sendiri dengan menggunakan:

- Jasa kontraktor (diborongkan), maka harga perolehan aset bangunan diakui sebesar nilai kontraknya.
- Dibangun sendiri, maka harga perolehan aset diakui sebesar seluruh pengeluaran atas pembangunan gedung (*property*) tersebut.

7. Perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian (Sumarsan, 2014).

2.1.5. Metode Penyusutan Aset Tetap Menurut Perpajakan

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 11 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk

pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Dalam pengaturan penyusutan tersebut mengandung maksud persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan dan metode panyusutannya. Persyaratan aset tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi:

1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud.
2. Harta tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Dalam sistem penyusutan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, semua aset tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi dua golongan:

1. Harta berwujud kelompok bukan bangunan
2. Harta berwujud kelompok bangunan

Tabel 2. 1 Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun

Sumber: Undang-undang Pajak 2008

Tabel 2. 2 Harta Berwujud Kelompok Bangunan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
Bangunan permanen	20 tahun
Bangunan tidak permanen	10 tahun

Sumber: Undang-undang Pajak 2008

Untuk lebih memudahkan Wajib Pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokkan harta berwujud bukan bangunan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 tanggal 7 Februari 1995 sebagaimana telah diamandemen dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 yang mengatur tentang pengelompokan Jenis-jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan.

Tabel 2.3 Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 1

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan,</p> <p>b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, <i>printer</i>, <i>scanner</i> dan sejenisnya.</p> <p>c. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi, dan sejenisnya.</p> <p>d. Sepeda motor, sepeda, dan becak.</p> <p>e. Alat perlengkapan khusus bagi industri/jasa yang bersangkutan.</p> <p>f. Dies, jigs dan mould.</p> <p>g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin, seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu, dan lain-lain.
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, pellet, dan sejenisnya.
4.	Transportasi dan pergudangan	Mobil taksi, bus, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester</i> , <i>writer machine</i> , <i>bipolar test system</i> , <i>elminator (PE8-1)</i> , <i>pose checker</i> .
6.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Achor</i> , <i>anchor chains</i> , <i>polyester rope</i> , <i>steel buoys</i> , <i>steel wire ropes</i> , <i>mooring accessories</i> .

7.	Jasa telekomunikasi seluler	<i>Base station controller.</i>
----	-----------------------------	---------------------------------

Tabel 2.4 Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 2

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mobil, bus, truk, <i>speed boat</i>, dan sejenisnya.</p> <p>c. Kontainer dan sejenisnya.</p>
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<p>a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak penggaruk, penanaman, penebar benih, dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.</p>
3.	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.</p> <p>c. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.</p> <p>d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi</p>

		bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan / produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5.	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump truck</i> , <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya
7.	Trasportasi dan pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. c. Kapal balon.
8.	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon. b. Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio

		telepon.
9.	Industri semi konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire tester.</i>
10.	Jasa persewaan peralatan tambat air	<i>Spooling machines, metocean data collector</i>
11.	Jasa telekomunikasi selular	<i>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Center, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, Intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Anthena.</i>

Tabel 2.5 Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 3

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2.	Permintalan, penenunan dan pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain - kain bulu, tule).</p> <p>b. Mesin untuk yang <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.</p>
3.	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4.	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, obat kecantikan dan obat rias, sabun, deterjen dan obat organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, barang fotografi dan sinematografi).</p> <p>b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk industri lainnya, misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet</p>

		sintetis, karet tiruan, jangat dan kulit mentah.
5.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6.	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal - kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1 000 DWT</p> <p>c. Dok terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter segala jenis.</p>
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar, dan kendali jarak jauh.

Tabel 2.6 Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan Kelompok 4

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Transportasi dan pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokomotif uap dan tender atas rel b. Lokomotif listrik atas rel dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum batu batuan - batuan tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat diatas 1000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran keran terapung dan sebagainya yang mempunyai berat di atas 1000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009

Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan yaitu Metode Garis

Lurus (*straight line method*) atau Metode Saldo Menurun (*declining balance method*) (Suandy, 2008).

1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Metode ini disebut dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Contoh penggunaan metode ini misalnya sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 200.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 (dua puluh) tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar 10.000.000,00 ($\text{Rp } 200.000.000,00 / 20 \text{ tahun}$). Dasar penyusutan dalam perpajakan adalah harga perolehannya, taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan.

2. Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)

Metode ini termasuk metode penyusutan yang dipercepat dan dapat dipakai dalam perpajakan. Tarif pajak dalam metode ini telah ditentukan terlebih dahulu dan besarnya sama untuk setiap tahun. Penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai buku yang semakin kecil. Dasar penyusutan pada tahun pertama sama dengan nilai perolehan, sehingga taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan dalam metode ini. Contoh penggunaan metode ini, misalnya sebuah kendaraan dibeli pada bulan Januari tahun 2011 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat dari kendaraan tersebut adalah 4 tahun. Jika tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Contoh Perhitungan Penyusutan Metode Saldo Menurun

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga perolehan			Rp. 150.000.000,00
2011	50%	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00
2012	50%	Rp. 37.500.000,00	Rp. 37.500.000,00
2013	50%	Rp. 18.750.000,00	Rp. 18.750.000,00
2014	Disusutkan sekaligus	Rp. 18.750.000,00	Rp. 0,00

(Lumbantoruan, 1999)

Metode mana yang akan dipakai tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa metode yang dipilih harus diterapkan terhadap seluruh kelompok harta. Maksudnya, Wajib Pajak tidak dapat menggunakan Metode Saldo Menurun terhadap kelompok yang satu dan menerapkan Metode Garis Lurus terhadap kelompok lainnya. Dalam hal Wajib Pajak memilih Metode Saldo Menurun, maka pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Aset tetap bangunan hanya menggunakan satu metode yaitu Garis Lurus. Sebagai akibat dari adanya dua metode penyusutan ini, timbul perbedaan persentase penyusutan fiskal (Suandy, 2008). Tabel 2.8 dibawah ini memperlihatkan tarif penyusutan untuk aset yang dikelompokkan menurut metode penyusutannya.

Tabel 2.8 Tarif Penyusutan untuk Aset Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Tarif	
	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Bukan Bangunan		
Kelompok 1	25%	50%
Kelompok 2	12,5%	25%
Kelompok 3	6,25%	12,5%
Kelompok 4	5%	10%
Bangunan		
Permanen	5%	
Tidak permanen	10%	

Sumber: Undang-undang Pajak 2008

Penelitian ini menggunakan Metode Garis Lurus (*Straight line method*) untuk perhitungannya, karena penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan yang sama besar setiap periode dan memberikan biaya yang lebih kecil sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan.

2.1.6. Pembiayaan Melalui Alternatif Pembiayaan Tunai, Kredit Bank dan *Leasing*

2.1.6.1. Pembiayaan Secara Tunai

Pembiayaan tunai merupakan salah satu jenis pembiayaan dengan memanfaatkan kas atau uang tunai yang dapat dipakai oleh suatu perusahaan untuk melakukan suatu pembelian peralatan atau barang-barang modal. Dana modal sendiri tersebut biasanya diperoleh dari cadangan investasi pada

perusahaan. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah pembayaran secara tunai dilakukan untuk pembelian peralatan atau barang modal yang nilai harga perolehannya tidak terlalu besar. Pembayaran secara tunai dilakukan dengan memperhatikan posisi saldo kas minimum agar tidak mengganggu posisi kas atau uang tunai yang digunakan untuk biaya operasional jangka pendek.

Jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak dengan pembiayaan secara tunai adalah biaya penyusutannya dan biaya penyusutan ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan (Suandy, 2008).

Jurnal yang dicatat oleh perusahaan untuk perolehan aset melalui pembelian secara langsung adalah sebagai berikut:

1/1/11 MesinXXXX

 Kas.....XXXX

2.1.6.2. Pembiayaan Secara Kredit Bank

Perkembangan kegiatan perekonomian menyebabkan meningkatnya tuntutan kebutuhan pendanaan dan pembiayaan operasional perusahaan. Hal ini menyebabkan adanya pelaku usaha yang memerlukan bantuan pihak luar dalam pemenuhan kebutuhan dana modal tersebut.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Atas dasar tujuan penggunaan dana, kredit dapat dibedakan menjadi:

1. Kredit Modal Kerja, adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah, misalnya untuk pembelian bahan baku, pembelian bahan bakar, pembayaran gaji karyawan, pembayaran listrik, dan lain-lain. Biasanya Kredit Modal Kerja berjangka pendek dan disesuaikan dengan jangka waktu perputaran modal kerja nasabah.
2. Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan nasabah, misalnya untuk pembelian tanah atau bangunan, mesin, komputer untuk kantor, truk pengangkut, dan sebagainya. Kredit investasi biasanya berjangka menengah atau panjang, karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasan oleh nasabah melalui angsuran.
3. Kredit Konsumsi, adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah, misalnya untuk pembelian mobil pribadi, dan barang-barang konsumsi yang lain.

Dalam pembiayaan secara kredit kepada bank, perusahaan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara umum oleh bank dan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang melakukan permohonan kredit membuat surat permohonan kredit kepada bank yang ditunjuk dengan menyebutkan tujuan dan besarnya kredit yang diminta.

2. Apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, perusahaan mengisi formulir permohonan dan wajib menyerahkan lampiran perizinan dan legalitas sesuai dengan bidang kegiatan atau usahanya, antara lain Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha, Sertifikat Tanah, dan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Setelah formulir permohonan pinjaman diisi lengkap disertai dengan lampiran-lampirannya, bank akan melakukan pemeriksaan secara teknis dengan formula 5 C yang meliputi:

- a. *Character* (Watak)

Bank akan menilai watak kehidupan calon peminjam yang meliputi kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga (anak dan istri), dan lain sebagainya yang merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar kembali pinjamannya.

- b. *Capacity* (Kemampuan)

Dengan formula ini bank menilai apakah calon peminjam tersebut mempunyai kemampuan dan pengalaman bisnis untuk memajukan usahanya setelah diberi kredit oleh bank. Kemampuan ini dipengaruhi oleh watak, modal dan calon peminjam. Apabila rasio-rasio keuntungan terlihat semakin meningkat di dalam pembukuan, hal ini berarti kemampuan pengusaha menunjukkan usahanya makin maju. Jadi bank dapat menilai dan memastikan bahwa pengusaha tersebut mempunyai kemampuan yang baik untuk usaha pada waktu yang akan datang.

c. *Capital* (Modal)

Sehat dan tidak sehatnya keadaan usaha nasabah dapat dilihat salah satunya melalui laporan keuangannya. Dari laporan keuangan ini, pihak bank bisa mengetahui tingkat keuntungan, jumlah dana yang diperlukan, waktu tambahan dana yang diperlukan, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank, permasalahan teknis dan pemasaran yang dihadapi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pihak ketiga, efisiensi alokasi dana dalam berbagai bentuk aset dan lain-lain.

d. *Condition* (Keadaan)

Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampak tersebut bisa sebagai yang disukai oleh masyarakat, atau tidak disukai oleh masyarakat, dan bisa juga keduanya terjadi secara bersamaan. Pihak bank akan berusaha ekstra hati-hati apabila terdapat ketidaksukaan masyarakat yang akan menyebabkan terganggunya usaha nasabah di masa yang akan datang.

e. *Collateral* (Jaminan)

Sebenarnya jaminan bukan merupakan faktor utama yang dijadikan oleh bank untuk menentukan keputusan pemberian dana kepada suatu nasabah tertentu. Namun mengingat analisis yang telah dilakukan bank terhadap berbagai aspek yang lain seperti telah disebutkan di atas tidak selalu dapat mencerminkan kinerja nasabah di masa datang, pihak bank perlu berjaga-jaga terhadap kemungkinan terburuk. Untuk mengantisipasi kemungkinan macetnya pemenuhan kewajiban oleh nasabah maka bank mewajibkan nasabah untuk menyerahkan berbagai

bentuk agunan sebelum dana diberikan kepada nasabah tersebut. Hal terpenting dalam penyerahan agunan ini adalah keabsahan secara yuridis dalam perjanjian pengikatan agunan. Pihak bank harus yakin agunan yang telah berdasarkan perjanjian yang sah secara yuridis. Agunan ini meliputi:

- i. Agunan utama: adalah barang yang dibiayai oleh dana dari bank. Apabila dana dari bank digunakan untuk pembelian mesin, maka mesin itu dapat dijadikan agunan utama.
 - ii. Agunan tambahan: adalah barang yang tidak dibiayai oleh dana bank dan bukan merupakan bagian barang yang diinginkan untuk kegiatan operasional usaha nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami masalah atau bangkrut, seringkali dana kas atau persediaan atau piutang tidak dapat dilikuidasi untuk memenuhi berbagai kewajiban nasabah kepada pihak lain. Oleh sebab itu, nasabah harus menyerahkan agunan tambahan di luar barang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha nasabah.
4. Setelah diadakan pemeriksaan oleh bank dengan formula 5 C, maka akan diperoleh keputusan. Permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak oleh bank. Surat keputusan penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya, dan berkas permohonan akan dikembalikan oleh pihak bank kecuali surat permohonannya.
 5. Jika permohonan kredit diterima, persetujuan atas permohonan kredit disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan syarat-syarat antara lain

maksimum/limit fasilitas kredit, jangka waktu kredit, suku bunga dan sebagainya (Susilo, 2000).

Dari aspek perpajakan, beban yang dapat dibiayakan adalah biaya penyusutan dan biaya bunga. Ketentuan peraturan perpajakan untuk beban bunga pinjaman adalah bahwa dapat terjadi dana yang diterapkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya langsung atau tidak langsung berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga. Apabila hal tersebut terjadi Wajib Pajak dapat memperkecil Penghasilan Kena Pajak, karena bunga yang terutang atau dibayar atas pinjaman tersebut dikurangkan sebagai biaya, sedangkan bunga yang diterima atau diperoleh yang berasal dari penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 15% (SE46/PJ.4/1995, Direktur Jenderal Pajak, 10 Mei 1995). Sehubungan dengan hal tersebut, diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dan yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
2. Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Jika perusahaan melakukan pembelian aset tetap atau barang modal melalui kredit bank, maka jumlah yang dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan yang telah diterapkan oleh peraturan perpajakan (Suandy, 2008)

Harga perolehan untuk aset yang diperoleh melalui kredit bank adalah sebesar harga beli aset tersebut, biaya bunga bank untuk aset yang siap digunakan harus dianggap sebagai beban. Untuk menghitung jumlah angsuran yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak bank tiap periode, penggunaan rumus:

$$PVA_n = A (PVIFA_{i,n})$$

Kredit yang dibutuhkan untuk membiayai pengadaan barang modal biasanya jumlahnya besar. Disamping itu, jangka waktu kredit cukup lama. Dengan demikian resiko yang dihadapi perusahaan cukup besar. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu kelayakan terhadap pengajuan kredit untuk membiayai pengadaan barang modal tersebut.

Jurnal untuk perolehannya dan pembayaran hutang bank adalah sebagai berikut:

1/1/11 MesinXXXX

 Hutang Bank.....XXXX

(untuk mencatat perolehan mesin melalui hutang bank)

31/1/11 Hutang BankXXXX

Biaya Bunga.....XXXX

Kas.....XXXX

(untuk mencatat pembayaran hutang bank tiap periode)

2.1.6.3. Pembiayaan secara Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing didefinisikan sebagai ikatan kontrak antara pemilik barang modal (*lessor*), dan pihak yang lain (*lessee*), dimana *lessor* memberikan hak eksklusif kepada *lessee* untuk mempergunakan barang modal itu selama jangka waktu tertentu. Dalam banyak kejadian, jangka waktu penggunaan barang modal itu sama dengan umur ekonomisnya.

Sebagai imbalannya secara periodik *lessee* membayar sewa kepada *lessor* yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua pihak sebelumnya. Pada akhir masa kontrak, *lessee* mempunyai tiga macam pilihan, yaitu:

1. Mengembalikan barang modal kepada *lessor*.
2. Memperpanjang masa kontrak.
3. Membeli barang modal dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.O1/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) mendefinisikan leasing sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh *lease* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *lessee* sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Beberapa istilah yang sering dipakai dalam transaksi *Leasing* seperti:

1. Barang modal adalah setiap aset tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang diatas tanah tersebut melekat aset tetap berupa bangunan dan tanah serta aset dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *Lessee*.
2. *Lessor* adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha.
3. *Lessee* adalah perusahaan atau perseorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari *Lessor*.
4. Harga perolehan (*acquisition cost*) adalah harga beli barang modal yang disewagunausahakan ditambah dengan biaya langsung.
5. Nilai pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal secara riil dikeluarkan oleh *lessor*.
6. Pembayaran sewa guna usaha (*lease payment*) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh *lessee* kepada *lessor* selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.

7. Angsuran pokok pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan.
8. Nilai sisa (*residual value*) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh *lessor* dengan *lessee* pada awal masa sewa guna usaha yang besarnya biasanya 10% dari harga pembelian.
9. Simpanan jaminan (*security deposit*) adalah jumlah uang yang diterima *lessor* dari *lessee* pada permulaan masa sewa guna usaha sebagai jaminan untuk kelancaran sewa guna usaha.
10. Masa sewa guna usaha (*lease term*) adalah jangka waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewagunausahakan oleh *lessee* sampai perjanjian sewa guna usaha berakhir.
11. Masa sewa guna usaha pertama adalah jangka waktu sewa guna usaha barang modal untuk transaksi sewa guna usaha yang pertama kali.
12. Opsi (*option right*) adalah hak *lessee* untuk membeli barang modal yang disewagunausahakan atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.

Dari beberapa definisi *leasing* tersebut dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha atau *leasing* merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa (*residual value*).

Ditinjau dari pihak *lessee*, *leasing* mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan tersebut antara lain (Kieso, 2001):

1. Pembiayaan dengan suku bunga tetap

Perusahaan tidak terganggu dengan fluktuasi suku bunga yang berlaku di pasar sehingga tidak terjadi kerugian akibat fluktuasi suku bunga.

2. Sangat fleksibel

Leasing bersifat sangat fleksibel karena antara *lessor* dengan *lessee* dapat saling menyesuaikan dalam hal kontrak, jangka waktu pembayarannya, dan lain-lain.

3. *On* atau *Off balance sheet*

Perusahaan dapat menyusun laporan posisi keuangan berdasarkan *on* atau *off balance sheet* yang sesuai dengan target perusahaan.

4. Melindungi terhadap kadaluarsanya aset

Perusahaan dapat menggunakan aset tetap yang baru tanpa membeli sehingga perusahaan tidak khawatir aset tetapnya ketinggalan mode atau teknologi.

5. Penghematan pajak

Perusahaan dapat menghemat pajak karena semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha (*lease payment*) dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

Kerugian-kerugian *leasing* adalah sebagai berikut:

1. *Lessee* mungkin tidak dapat memanfaatkan keuntungan dari nilai sisa.
2. Persyaratan yang ditetapkan oleh *lessor* terkadang cukup berat, misalnya membatasi pengoperasian aset.
3. Aset yang disewa tidak dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

4. *Finance lease* tidak tepat dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek.
5. Pada umumnya biaya bunga *leasing* lebih tinggi daripada biaya bunga pinjaman pada bank. Tingkat bunga *leasing* rata-rata adalah 110% dari bunga pinjam, karena sebagian besar perusahaan *leasing* sumber dananya berasal dari pinjaman bank.

Perlakuan pajak bagi *lessee* ditentukan bahwa selama masa sewa guna usaha, *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewagunausahakan. Penyusutan baru dapat dilakukan setelah *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Untuk perpajakan tidak ada satu pihak pun yang diperkenankan untuk melakukan penyusutan atas aset yang disewaguna usahakan (Lumbantoruan, 1999).

Setelah *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, *lessee* dapat melakukan penyusutan. Dasar penyusutan adalah nilai sisa (*residual value*) barang modal yang bersangkutan. Nilai residual menurut ketentuan fiskal adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh *lessor* dengan *lessee* pada awal masa sewa guna usaha.

Dalam pasal 1 huruf d angka 1 UU PPN, disebutkan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak karena perjanjian *leasing* adalah penyerahan yang dikenakan PPN. Dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), ada dua jenis penyerahan, yaitu penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak.

Biaya *leasing* yang dibayarkan atau terutang oleh *lessee* adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Dalam praktek, perusahaan sering menggunakan fasilitas seperti kendaraan melalui sewa guna usaha, maka fiskus telah menegaskan perlakuan perpajakan atas penyediaan fasilitas yang dimaksud (Lumbantoruan, 1999).

Jurnal pencatatan untuk perolehan aset melalui *leasing* adalah sebagai berikut:

1/1/11	<i>Security Deposit</i>	XXXX
	Kas.....	XXXX
	(untuk mencatat pembayaran jaminan yang harus dibayar <i>lessee</i>)	
1/1/11	Mesin yang di- <i>lease</i>	XXXX
	Hutang <i>leasing</i>	XXXX
	(untuk mencatat timbulnya hutang mesin melalui <i>leasing</i>)	
31/1/11	Hutang <i>leasing</i>	XXXX
	Bunga <i>leasing</i>	XXXX
	Kas.....	XXXX
	(untuk mencatat pembayaran <i>leasing</i> periode pertama)	

2.1.7. Dampak atau Pengaruh Biaya yang dapat dikurangkan antara Tunai, Kredit Bank, dan Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Dampak atau pengaruh biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak untuk masing-masing pilihan pembiayaan aset tetap dapat digunakan untuk menganalisis alternatif pembiayaan yang paling menguntungkan antara tunai, kredit bank, dan sewa guna usaha (*leasing*). Tabel 2.9 dibawah ini memperlihatkan dampak atau pengaruh biaya yang dapat

dikurangkan antara tunai, kredit bank, dan sewa guna usaha (*leasing*) menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tabel 2.9 Dampak atau Pengaruh Biaya yang Dapat Dikurangkan Antara Tunai, Kredit Bank, dan Sewa Guna Usaha (*leasing*) menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia.

Alternatif Pembiayaan	Biaya yang Dapat Dikurangkan	Cara Perhitungan/Penentuan Besarnya Biaya
Pembiayaan secara Tunai	Biaya penyusutan	Besarnya biaya penyusutan ditentukan oleh masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang ditentukan Peraturan Perpajakan.
Pembiayaan secara Kredit Bank	Biaya penyusutan Biaya bunga pinjaman	Besarnya ditentukan masa manfaat (umur ekonomis) dan metode penyusutan yang ditentukan Peraturan Perpajakan. Besarnya biaya bunga atas pinjaman pada bank dihitung berdasarkan suku bunga yang dibebankan oleh kreditur terhadap sisa kewajiban peminjam (debitur). Umumnya suku bunga

	Biaya lain-lain	<p>atas pinjaman jangka panjang lebih tinggi dari pada pinjaman jangka pendek kepada peminjam yang sama.</p> <p>Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi kredit bank meliputi pembayaran biaya asuransi dan biaya notaris.</p>
<p>Pembiayaan secara Sewa Guna Usaha (<i>leasing</i>)</p>	<p><i>Lease fee</i></p> <p>Biaya lain-lain</p> <p>Biaya penyusutan</p>	<p>Biaya <i>lease fee</i> terdiri dari biaya pokok ditambah dengan biaya bunga <i>leasing</i>.</p> <p>Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan dan untuk penyelesaian administrasi kredit bank meliputi pembayaran biaya asuransi dan biaya notaris.</p> <p>Setelah mengambil alih aset tetap yang disewa guna usaha dengan hak opsi, dasar penyusutannya adalah</p>

		<p>nilai sisa aset tetap yang bersangkutan. Nilai sisa (<i>residual value</i>) menurut ketentuan fiskus adalah nilai aset tetap pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh <i>lessor</i> dengan <i>lessee</i> pada awal masa sewa guna usaha.</p>
--	--	---

(Sumber: Suandy, 2008)

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Melani (2003) dengan judul “Analisis Perbandingan Penghematan Pajak Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Memperoleh Aktiva Tetap melalui *Leasing* atau Kredit Bank (Studi Kasus pada UD.”X”)” menganalisis tentang pembiayaan manakah yang paling menguntungkan diantara dua alternatif pembelian ditinjau dari dampak pengaruh biaya yang dapat dikurangkan untuk masing-masing pilihan transaksi aktiva tetap terhadap pajak penghasilan yang dapat dihemat oleh perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa alternatif pembelian melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) merupakan alternatif yang paling menguntungkan karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan lebih besar dibandingkan alternatif pembelian melalui kredit bank.

Penelitian berikutnya dilakukan Natania (2004) dengan judul “Perencanaan Pajak Dalam Pengambilan Keputusan untuk Perolehan Aktiva Tetap Melalui Pembiayaan Secara Tunai, Kredit dan *Leasing* pada PT.”X” menganalisis tentang penerapan perencanaan pajak dalam perolehan pengambilan keputusan perusahaan melalui *leasing*, tunai, atau kredit dan alternatif pembiayaan manakah yang paling menguntungkan setelah adanya penerapan perencanaan pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa alternatif pembiayaan melalui sewa guna usaha (*leasing*) merupakan alternatif yang paling menguntungkan karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan lebih besar dibandingkan alternatif pembiayaan melalui kredit bank dan tunai.

Penelitian Irwan (2012) dengan judul “Analisa Komparasi Kredit Bank Versus *Financial Leasing* untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Atas Perolehan Aktiva Tetap (Studi Kasus di Perusahaan Percetakan)” menganalisis untuk mengetahui pembiayaan mana yang lebih dapat menghemat pembayaran pajak saat melakukan pembelian aktiva mesin percetakan antara pembiayaan *financial lease* dengan pembiayaan kredit dari bank. Hasil penelitian membuktikan bahwa pembiayaan *leasing* lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembiayaan kredit bank.

Penelitian oleh Angela (2012) dengan judul “Perbandingan antara Pembelian Tunai, Kredit Bank, dan *Leasing* Ditinjau dari Aspek Perpajakan” menganalisis tentang bagaimana penerapan perencanaan pajak untuk menentukan pembiayaan yang mempunyai penghematan pajak terbesar di PT.”X” yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Hasil penelitian membuktikan bahwa alternatif

pembelian melalui sewa guna usaha (*leasing*) merupakan alternatif yang paling menguntungkan karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan lebih besar dibandingkan alternatif pembelian secara tunai dan kredit bank.

Penelitian oleh Putri dan Andrianus (2013) dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak dalam Keputusan Pembelian *Mixer truck* Kaitannya dengan Penghematan Pajak (Studi Kasus pada PT. Duta Bangsa Mandiri, Pasuruan)” bertujuan untuk memberikan gambaran dalam memilih alternatif pembelian yang lebih menguntungkan perusahaan antara tunai, kredit bank, dan *leasing* dengan hak opsi untuk mencapai penghematan pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan disarankan untuk memilih alternatif pembelian melalui *leasing* dengan hak opsi agar dapat menghemat pajak yang lebih tinggi.

Penelitian kali ini, penulis akan membahas tiga alternatif pembelian aset tetap sebagai barang modal operasional perusahaan yaitu secara tunai, kredit bank dan *leasing* dengan hak opsi. Atas ketiga alternatif tersebut dilakukan perbandingan jumlah penghematan pajak dengan menghitung besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari masing-masing alternatif pembelian. Penelitian dilakukan pada PT.“X” yang bergerak di bidang konstruksi sipil.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang dilakukan adalah berupa studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang penerapan *tax planning* dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui pembiayaan secara tunai, kredit bank, dan *leasing*. Dari alternatif pembiayaan tersebut dapat ditentukan alternatif pembiayaan mana yang paling menguntungkan perusahaan berkaitan dengan konsekuensi perpajakan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

- **Data Primer**

Data primer merupakan data utama penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak manajemen dan semua pihak yang berhubungan dengan aktivitas pembelian di PT. "X" untuk mendapatkan data dan keterangan lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Daftar pertanyaan yang dibutuhkan saat wawancara sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, tujuan perusahaan, serta struktur organisasi perusahaan?

2. Apakah perusahaan memiliki perencanaan pajak dalam memperoleh aset tetap yang baru sebagai barang modal operasional perusahaan yang dapat menghemat beban pajak agar laba bersih perusahaan meningkat?
3. Bagaimana upaya perusahaan dalam memperoleh aset tetap yang baru sebagai barang modal operasional perusahaan?
4. Apakah perusahaan pernah memperoleh aset tetap yang dibeli secara tunai dan bagaimana prosedur perolehannya?
5. Apakah perusahaan pernah memperoleh aset tetap yang dibeli secara kredit bank dan bagaimana prosedur perolehannya serta data apa saja yang dibutuhkan?
6. Apakah perusahaan pernah memperoleh aset tetap yang dibeli secara leasing dan bagaimana prosedur perolehannya serta data apa saja yang dibutuhkan?
7. Jenis aset tetap apa yang akan diperoleh perusahaan?
8. Berapa harga perolehan aset tetap baru tersebut?
9. Bagaimana *schedule* pembayaran aset tetapnya?
10. Berapa jangka waktu pembiayaan serta tingkat bunga pinjaman dan tingkat bunga leasing?
11. Metode apa yang digunakan perusahaan dalam metode penyusutan fiskal?

- Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan studi literatur tentang perusahaan khususnya yang berhubungan

dengan penelitian ini seperti struktur organisasi, data pembelian aset, dan *schedule* pembayaran aset tetap tersebut.

Data kualitatif perusahaan yaitu jenis aset tetap yang akan diperoleh perusahaan, jangka waktu pembiayaan, suku bunga yang digunakan, tingkat bunga pinjaman dan bunga *leasing* yang berlaku pada bank atau *leasing company*, dan metode penyusutan fiskal yang digunakan perusahaan.

Sedangkan data kuantitatif yaitu harga perolehan aset tetap, besarnya pembiayaan yang ditanggung bank atau *lessor*, besarnya nilai residual dan simpanan jaminan, jadwal pembayaran pinjaman atau *leasing*, biaya administrasi, besarnya nilai opsi untuk pembelian aset tersebut, dan tingkat diskonto yang menentukan present value dari besarnya penghematan pajak yang diperoleh perusahaan.

3.3. Metode Analisis

- Metode Analisis Deskriptif Komparatif

Suatu metode analisis yang dilakukan dengan menguraikan terlebih dahulu kondisi objek penelitian atau PT. "X" berdasarkan fakta dan data yang ada, kemudian membandingkan tiga alternatif pembiayaan aset tetap. Sehingga dapat menjelaskan bagaimana pajak dapat diminimalkan dengan memilih alternatif pembiayaan yang tepat.

- Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif

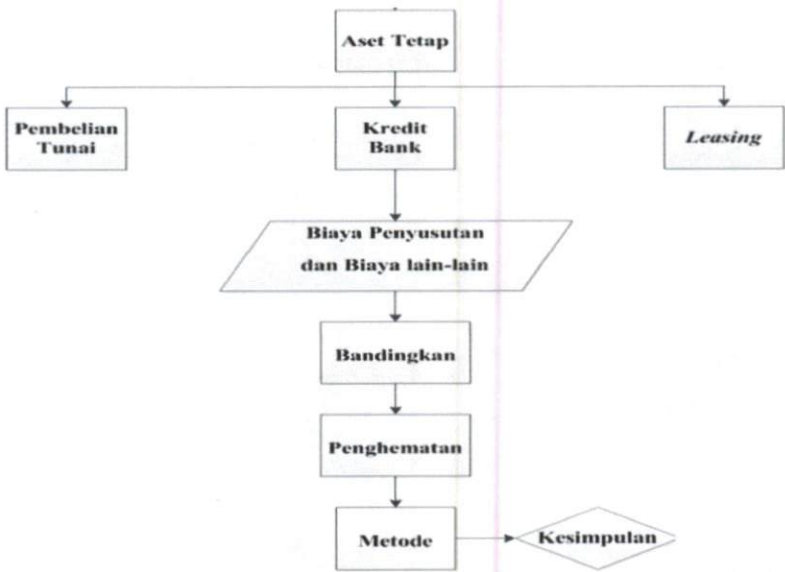
Suatu metode analisis yang dilakukan dengan menghitung besarnya biaya penyusutan per tahun, besarnya pembayaran per bulan, besarnya biaya

administrasi kredit bank atau *leasing*, besarnya biaya penyusutan setelah mengambil alih aset tetap yang *dileasingkan* dengan hak opsi, menentukan jumlah yang boleh dibebankan sebagai pengurang biaya, membandingkan besarnya penghematan pajak untuk aset tetap yang akan diperoleh perusahaan dengan ketiga alternatif tersebut.

- Metode Analisis Deskriptif Kualitatif

Suatu metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan fakta yang ditemukan dalam perusahaan dengan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban dari permasalahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

3.4. Kerangka Pemikiran



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran umum PT."X"

4.1.1. Sejarah Perusahaan

PT."X" adalah sebuah perusahaan konstruksi sipil yang berpusat di Jakarta bergerak dibidang usaha konstruksi dan infrastruktur seperti pengerjaan pembukaan jalan baru, pengaspalan jalan, pengerjaan jembatan, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, konstruksi pembangunan gedung, perdagangan barang dan jasa, usaha hasil pertambangan batu bara, sewa jasa angkutan dan alat berat, *staking dan lean clearing*.

Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2008 dengan memiliki cabangnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. PT."X" mempunyai karyawan dari berbagai tingkatan berjumlah 115 orang dan juga memiliki tenaga kerja lepas berjumlah 438 orang yang seluruhnya diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sebagai jaminan bagi para pekerja perusahaan. Upaya perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan membentuk kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang selalu memantau dan memberi masukan kepada perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dan kesehatan kerja.

4.1.2. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan ini didirikan adalah sebagai perusahaan swasta nasional bergerak dibidang konstruksi sipil yang menjadi perusahaan yang ramah lingkungan serta dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar guna meningkatkan taraf perekonomiannya.

Visi dan Misi Perusahaan:

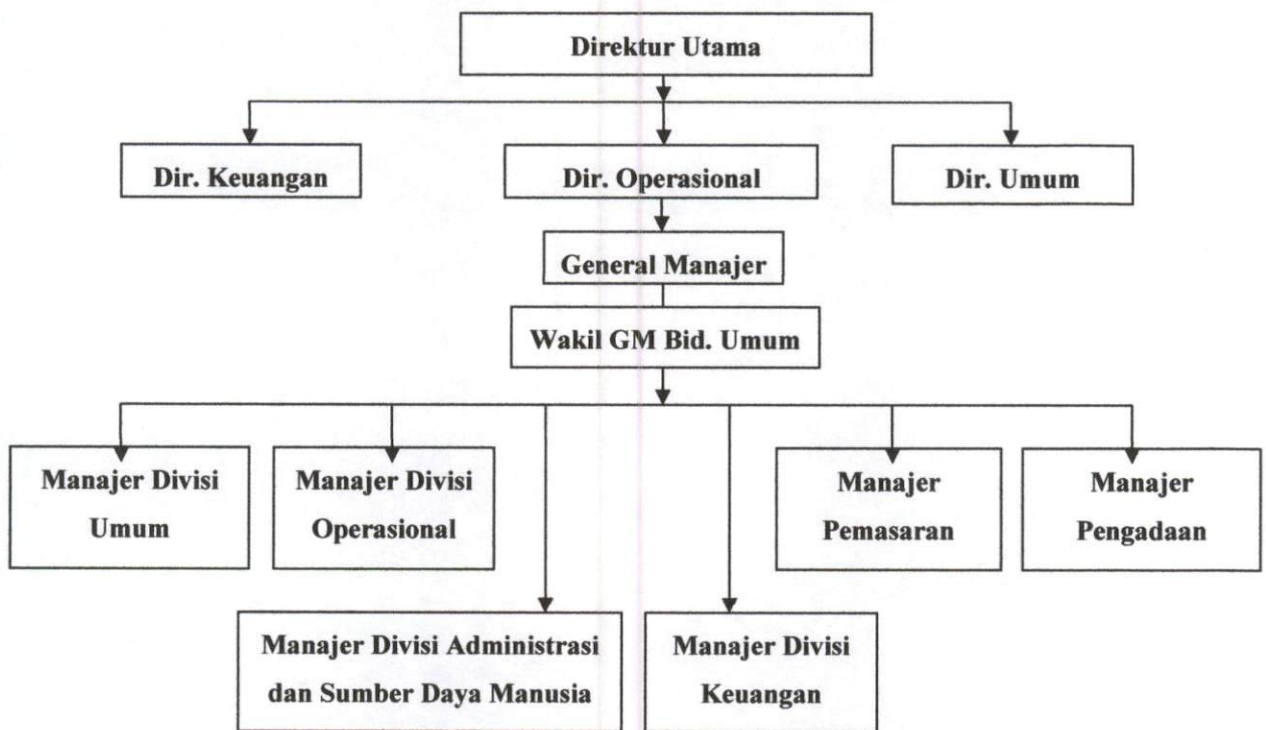
- Visi: Menjadikan perusahaan yang berwawasan internasional dibidang konstruksi dan infrastruktur.
- Misi: Membangun infrastruktur yang baik dan aman bersama pemerintah dan masyarakat.

4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang memperlihatkan tugas-tugas serta bahasan wewenang dalam hubungannya antar masing-masing bagian perusahaan. Perusahaan memerlukan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antar bagian yang meliputi pengaturan dan pemberian kerja dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka perusahaan menyusun struktur organisasi berbentuk garis atau lini yang artinya segala instruksi dan pengawasan berada pada satu tangan yaitu pemimpin kepada bawahan atau *top down*. Pemimpin akan memberikan tugas atau perintah kepada bagian yang ada dibawahnya dan bawahan tersebut harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemimpin perusahaan.

Segala keputusan dalam kegiatan investasi dan pendanaan diambil oleh Direktur Utama. Direktur perusahaan juga menetapkan visi, misi, tujuan, serta target perolehan yang diinginkan oleh perusahaan. Para manajer membantu pelaksanaan tugas sehari-hari dan harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diembannya secara teratur dan terjadwal.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. "X"



Sumber: Internal Perusahaan

Penjelasan struktur organisasi dan *job description* PT. "X" sebagai berikut:

1. Direktur Utama adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam perusahaan.

Direktur juga bertugas menentukan kebijaksanaan perusahaan, mengambil keputusan yang diajukan oleh bawahan, serta memeriksa semua laporan dan hasil pekerjaan untuk mengetahui maju mundurnya perusahaan.

2. Direksi Keuangan bertanggung jawab untuk mengarahkan penanggulangan berbagai jenis resiko finansial (*financial risk management*) yang dihadapi perusahaan, melakukan koordinasi aktifitas di Direktorat Keuangan, mengkoordinasi aktifitas sinergi untuk mencapai hasil bisnis yang optimal dari pelaksanaan seluruh usaha perusahaan. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. Direksi Operasional bertanggung jawab menjaga kontinuitas produksi *software*, mempertahankan suatu produksi *software* standar perusahaan yang telah ditetapkan, serta mengikuti perkembangan produksi *software* perusahaan agar dapat diadakan peningkatan produksi *software* yang lebih baik dalam penyempurnaan produksi *software*. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
4. Direksi Umum bertanggung jawab mengatur, memimpin, mengawasi dan mengendalikan, serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dibidang Hubungan Langgan, Keuangan dan Umum untuk mencapai tujuan perusahaan. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5. General Manajer memiliki tugas, wewenang dan tanggung memimpin, mengelola dan mengendalikan semua aktivitas operasional perusahaan agar dapat dicapai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai target pendapatan dan pengeluaran biaya sesuai dengan *budget* operasi.

Membuat rencana taktis perusahaan dan kebijakan operasional perusahaan termasuk implementasinya. Memberikan informasi kepada manajer bawahannya mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan serta perubahannya. Mengawasi dan mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan oleh setiap departemen dalam perusahaan.

6. Wakil GM bidang Umum bertanggung jawab kepada General Manajer dan mengkoordinasi kinerja bawahan-bawahannya. Memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa manajer fungsional.
7. Manajer Divisi Umum memiliki tanggung jawab seluruh bagian / fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi.
8. Manajer Divisi Keuangan bertugas merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target finansial perusahaan.
9. Manajer Divisi Operasional dan Teknis memiliki tanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan serta menyusun rencana kerja dan program perusahaan.
10. Manajer Pemasaran memiliki tugas merencanakan, mengatur, dan mengkoordinasikan strategi kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan dalam memperluas pangsa pasar.

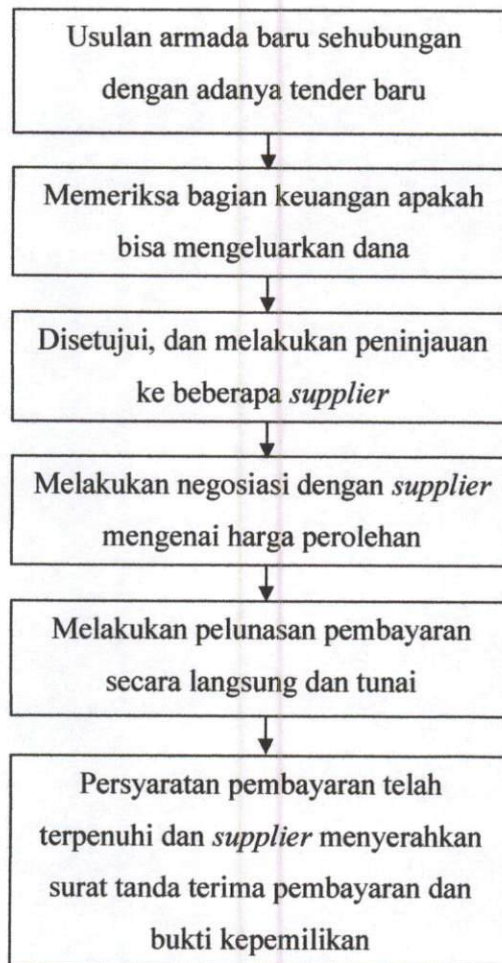
11. Manajer Divisi Administrasi dan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan SDM, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan fungsi manajemen SDM di seluruh perusahaan agar dapat menunjang dan meningkatkan kinerja SDM dalam mencapai target perusahaan.
12. Manajer Pengadaan bertugas menyediakan input barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain perusahaan.

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Prosedur untuk Transaksi Pembiayaan Secara Tunai

Transaksi pembiayaan secara tunai melibatkan dua pihak utama yaitu *supplier* dan pembeli. Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan jika perusahaan memilih alternatif pembiayaan secara tunai dapat dilihat pada gambar 4.2.

Gambar 4. 2 Prosedur Transaksi Pembiayaan Secara Tunai



Sumber: Internal Perusahaan

Keterangan:

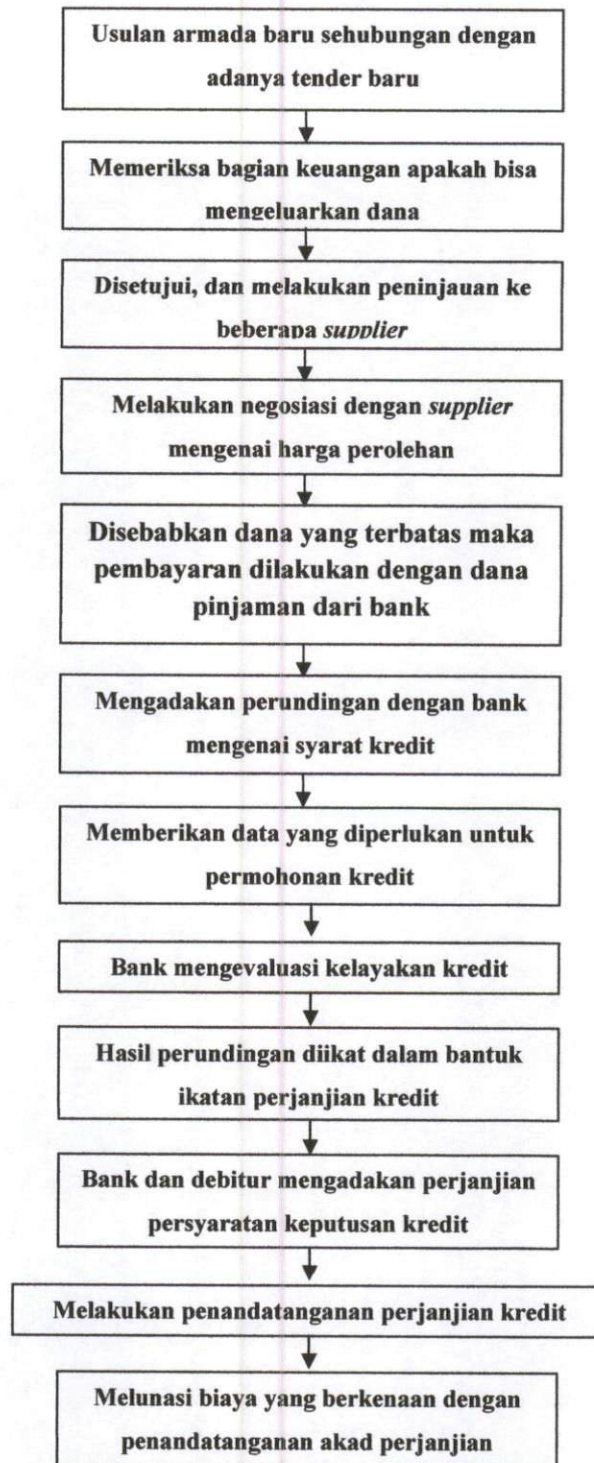
- a. Manajer Pengadaan mengusulkan kepada Pimpinan Perusahaan bahwa perusahaan membutuhkan armada baru sehubungan dengan adanya tender baru sehingga membutuhkan lebih banyak armada. Pimpinan perusahaan memberitahukan kepada Manajer Keuangan untuk memeriksa bagian keuangan dalam hal mengeluarkan dana untuk pembelian armada baru.

- b. Setelah didiskusikan dan disetujui maka Pimpinan Perusahaan mulai melakukan peninjauan ke beberapa *Supplier* untuk memperoleh armada tersebut serta melakukan perbandingan harga.
- c. Setelah menemukan kesepakatan, Pimpinan Perusahaan melakukan negosiasi ulang dengan *Supplier* yang dipilih. Negosiasi ulang ini dilakukan lebih terinci meliputi harga perolehan serta cara pembayarannya. Karena pembayarannya secara tunai maka dilakukan pelunasan pembayaran secara langsung. Meliputi:
- Pembeli: PT."X"
 - Aset tetap yang dibeli: Satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS heavy equipment
 - Cara pembayaran: Tunai
 - Jumlah pembayaran: Rp 1.400.000.000,00
- d. Setelah semua ketentuan dan persyaratan pembelian telah dilaksanakan dan dipenuhi maka *Supplier* menyerahkan surat tanda terima pembayaran serta bukti-bukti kepemilikan armada yang dibeli kepada pemilik.

4.2.2. Prosedur untuk Transaksi Pembiayaan Secara Kredit Bank

Transaksi melibatkan empat pihak utama yaitu kreditur, debitur, *supplier*, dan perusahaan asuransi. Langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan jika memilih alternatif pembiayaan secara kredit bank sesuai dengan prosedur bank rekanan perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4. 3 Prosedur Transaksi Pembiayaan Melalui Kredit Bank



Sumber: Internal Perusahaan

Keterangan:

- a. Manajer pengadaan mengusulkan kepada Pimpinan Perusahaan bahwa perusahaan membutuhkan armada baru sehubungan dengan adanya tender baru sehingga membutuhkan lebih banyak armada. Pimpinan Perusahaan memberitahukan kepada Manajer Keuangan untuk memeriksa bagian keuangan dalam hal mengeluarkan dana untuk membeli armada baru.
- b. Setelah didiskusikan dan disetujui maka Pimpinan Perusahaan mulai melakukan peninjauan ke beberapa *Supplier*, dimana armada tersebut akan diperoleh serta melakukan perbandingan harga.
- c. Setelah menemukan kesepakatan, Pimpinan Perusahaan melakukan negosiasi ulang dengan *Supplier* yang dipilih. Negosiasi ulang ini dilakukan lebih terinci meliputi harga perolehan serta cara pembayarannya. Keterbatasan dana perusahaan menyebabkan pembiayaan dilakukan dengan dana pinjaman dari bank. Dalam hal ini pihak bank (kreditur) yang ditunjuk perusahaan akan mendanai perolehan barang tersebut dan PT."X" (debitur) akan membayar angsuran kredit kepada bank.
- d. PT."X" sebagai debitur mengadakan perundingan dengan bank mengenai persyaratan sebagai berikut:
 - Jenis kredit
 - Jumlah kredit yang diberikan
 - Tujuan penggunaan kredit
 - Tingkat bunga kredit

- Rencana pelunasan kredit
 - Barang jaminan dan cara pengikatannya
 - Ketentuan asuransi atas barang-barang yang akan dijaminkan.
- e. Setelah selesai mengadakan perundingan, PT."X" memberikan data-data yang diperlukan untuk membuat permohonan kredit disertai dengan fotokopi dokumen pelengkap, yaitu:
- Akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perdagangan
 - Surat Ijin Tempat Usaha dari Pemerintah Setempat
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik
 - Laporan Keuangan dua tahun terakhir (*Balance Sheet* dan *Income Statement*)
 - Rekening Koran (*Bank Statement*) per tiga bulan terakhir
 - Spesifikasi atau data barang modal yang akan diperoleh dengan kredit yang bersangkutan, yang kemudian dijaminkan kepada bank kembali sebagai jaminan kebendaan.
- f. Bank akan mengevaluasi kelayakan kredit dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bonafiditas dan kredibilitas perusahaan
 - Situasi dan kondisi perusahaan melalui analisis laporan keuangan perusahaan

- Laporan kegiatan usaha yang telah ada
 - Hasil peninjauan langsung ke lokasi perusahaan
 - Data ekonomis dan yuridis dari barang modal yang akan dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, yang kemudian akan dijaminkan kepada bank kembali.
- g. Hasil perundingan tersebut diikat dalam ikatan resmi yaitu Ikatan Perjanjian Kredit (Ikatan Pemberian Jaminan) yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) Debitur: PT."X"
 - 2) Jenis kredit: Pinjaman Jangka Panjang
 - 3) Jumlah Kredit yang diberikan: Rp 1.400.000.000,00
 - 4) Tujuan Kredit untuk membiayai:
 - Jenis Aset Tetap: Satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment
 - Kebutuhan: Investasi
 - 5) Jangka waktu kredit: 3 tahun
 - 6) Tingkat Bunga: Suku bunga efektif 9% per tahun atau 0,75% per bulan
 - 7) Rencana pelunasan kredit:
 - Biaya asuransi selama jangka waktu kredit dan biaya administrasi: Dibayar pada saat panandatanganan akad perjanjian kredit dan akta pengikatan barang jaminan
 - Pembayaran ke-1 sampai 36: Sesuai jadwal pembayaran
 - 8) Pembayaran setiap bulan: Rp 35.615.700,58

9) Denda keterlambatan: 0,3% per hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 30 hari keterlambatan.

10) Biaya lain-lain:

- Biaya Asuransi: Rp 14.000.000,00
- Biaya Administrasi: Rp 5.600.000,00

11) Barang jaminan: Jaminan utama, yaitu aset tetap yang diperoleh (dibeli) dengan kredit yang bersangkutan.

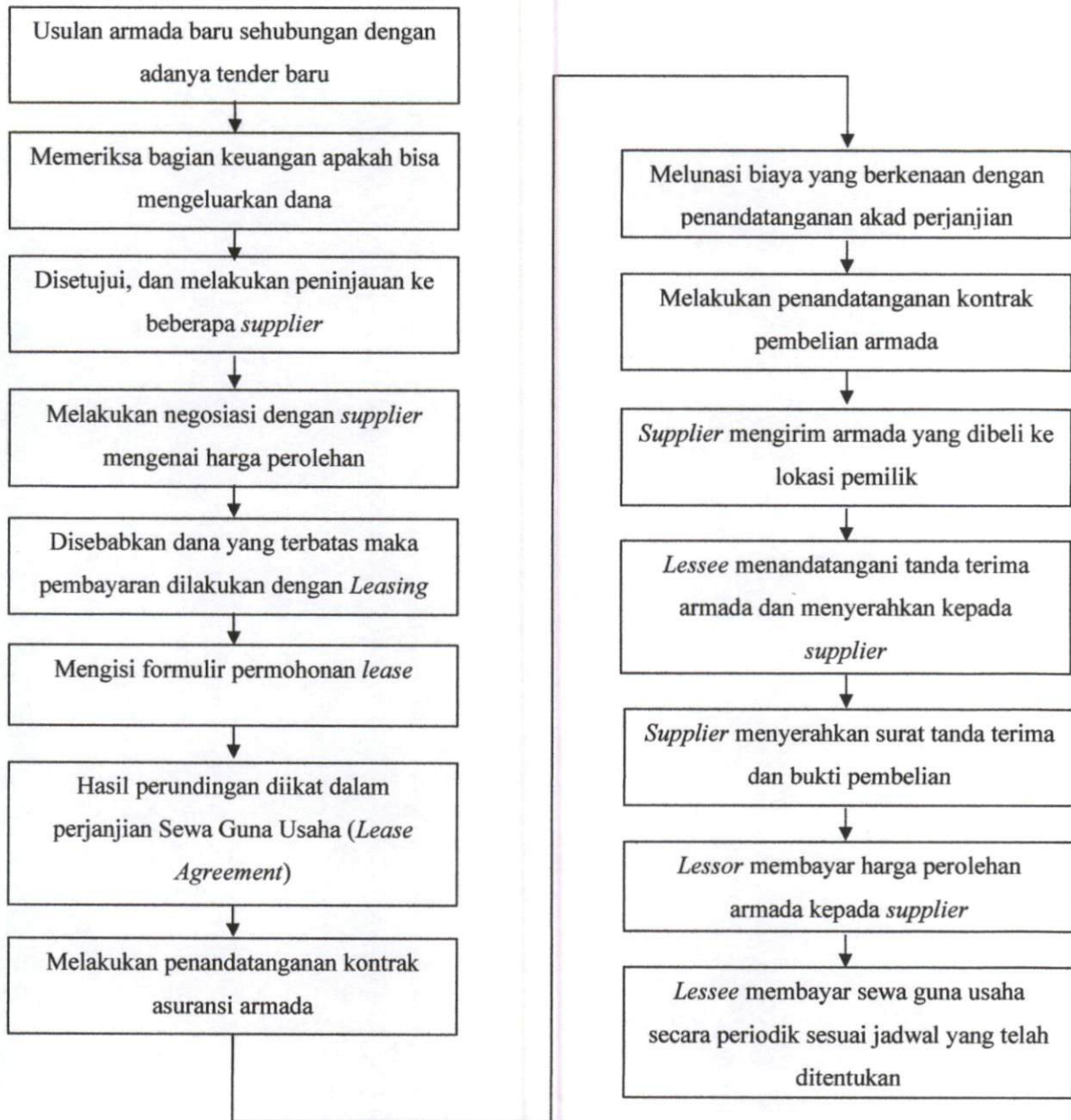
- h. Bank dan debitur mengadakan perjanjian bahwa PT."X" telah menyetujui segala isi dan persyaratan keputusan kredit guna membeli aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- i. Debitur melakukan penandatanganan perjanjian kredit serta menandatangani kontrak asuransi armada yang akan dikreditkan dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh bank.
- j. Debitur melunasi biaya-biaya yang berkenaan dengan penandatanganan akad perjanjian kredit dan akta pengikat barang jaminan termasuk pembayaran biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya.
- k. Setelah semua ketentuan dan persyaratan dalam keputusan kredit tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi maka bank akan mencairkan dana kredit yang dibutuhkan oleh debitur.
- l. PT."X" membayar harga perolehan aset tetap yang dibutuhkan kepada *supplier* yang bersangkutan.
- m. *Supplier* mengirim aset tetap yang dipesan oleh PT."X"

- n. PT."X" membayar cicilan secara periodik kepada bank (kreditur) sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak kredit.

4.2.3. Prosedur untuk Transaksi Pembiayaan secara Sewa Guna Usaha (Leasing)

Transaksi sewa guna usaha melibatkan empat pihak utama yaitu *lessor*, *lessee*, *supplier* dan perusahaan asuransi. Langkah-langkah alternatif pembelian secara *leasing* sesuai dengan prosedur *leasing company* rekanan perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4. 4 Prosedur Transaksi Pembiayaan melalui *Leasing*



Sumber: Internal Perusahaan

Keterangan:

- a. Manajer pengadaan mengusulkan kepada Pemimpin Perusahaan bahwa perusahaan membutuhkan armada baru sehubungan dengan adanya tender baru sehingga membutuhkan lebih banyak armada. Pimpinan perusahaan memberitahukan kepada Manajer Keuangan untuk memeriksa bagian keuangan dalam hal mengeluarkan dana untuk membeli armada baru.
- b. Setelah didiskusikan dan disetujui maka Pimpinan Perusahaan mulai melakukan peninjauan ke beberapa *supplier*, dimana armada tersebut akan diperoleh serta melakukan perbandingan harga.
- c. Setelah menemukan kesepakatan, Pimpinan Perusahaan melakukan negosiasi ulang dengan *supplier* yang dipilih. Negosiasi ulang ini dilakukan lebih terinci meliputi harga perolehan serta cara pembayarannya dilakukan dengan *leasing*. Pihak *lessor* yang ditunjuk perusahaan akan membayar harga perolehan aset tetap tersebut dan PT."X" akan membayar secara mengangsur kepada *lessor*.
- d. PT."X" sebagai *lessee* mengisi formulir permohonan *lease* kemudian mengirimkannya kepada *lessor* disertai fotokopi dokumen pelengkap yaitu sebagai berikut:
 - Akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya
 - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perdagangan
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik
 - Laporan Keuangan dua tahun terakhir (*Balance Sheet* dan *Income Statement*)
 - *Cash flow projection* dari barang modal yang akan disewagunausahakan
 - Rekening Koran (*Bank Statement*) per tiga bulan terakhir
 - Spesifikasi atau data aset tetap yang akan disewagunausahakan
- e. *Lessor* akan mengevaluasi kelayakan kredit dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bonafiditas dan kredibilitas perusahaan
 - Situasi dan kondisi perusahaan melalui analisis laporan keuangan perusahaan
 - Laporan kegiatan usaha yang telah ada
 - Hasil dari peninjauan langsung ke lokasi perusahaan
 - Rekomendasi data *customer* atau pihak lain terhadap perusahaan.
- f. Setelah *lessor* setuju maka dilanjutkan dengan perundingan syarat-syarat *lease* bersama *lessee*. Dalam pertemuan ini akan dirundingkan hal-hal sebagai berikut:
- Jenis transaksi sewa guna usaha
 - Harga perolehan merupakan harga beli aset tetap yang telah disepakati antara *supplier* dengan *lessee*
 - Pembayaran sewa guna usaha (*lease fee*)

- Angsuran pokok pembiayaan
- Nilai sisa (*residual value*)
- Simpanan jaminan (*security deposit*)
- Masa sewa guna usaha (*lease term*)
- Tingkat bunga *leasing*
- Cara pengikatan aset tetap yang di sewagunausahakan
- Ketentuan asuransi atas aset tetap yang disewagunausahakan
- Opsi bagi penyewagunausaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*).

g. Hasil perundingan tersebut diikat dalam suatu perjanjian yaitu Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Lessee*: PT."X"
- 2) Jenis transaksi sewa guna usaha: Sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*)
- 3) Jenis aset tetap yang disewa guna usaha: Satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment
- 4) Harga perolehan: Rp 1.400.000.000,00
- 5) Angsuran pokok pembiayaan: Rp 1.120.000.000,00
- 6) Nilai sisa: Rp 280.000.000,00
- 7) Simpanan jaminan: Rp 280.000.000,00
- 8) Masa sewa guna usaha: 3 tahun

9) Tingkat bunga : Suku bunga efektif 11%

10) Cara pembayaran :

- Simpanan jaminan, biaya asuransi selama masa sewa guna usaha, dan biaya administrasi : dibayar pada saat penandatanganan perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*)
- Pembayaran ke-1 sampai 36 : sesuai jadwal pembayaran (di belakang atau *in arrears*)

11) Pembayaran sewa guna usaha setiap bulan: Rp 36.667.376,51

12) Denda keterlambatan: 0,3% per hari keterlambatan

13) Biaya lain-lain:

- Biaya asuransi : Rp 14.000.000,00
- Biaya administrasi : Rp 5.600.000,00

14) *Lessee* dengan ini menyatakan memilih opsi beli sebesar nilai sisa (*residual value*) yaitu Rp 280.000.000,00 untuk satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment.

15) *Lessor* dan PT."X" mengadakan perjanjian bahwa *lessor* telah setuju untuk membeli aset tetap tersebut atas permintaan *lessee*.

h. *Lessee* menandatangani kontrak asuransi aset tetap yang disewagunausaha dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh *lessor*. Polis asuransi dipegang oleh *lessor* untuk mengantisipasi kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan barang.

- i. *Lessee* melunasi biaya-biaya yang berkenaan dengan penandatanganan perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*), termasuk pula pembayaran simpanan jaminan, biaya asuransi dan biaya administrasi.
- j. Kontrak pembelian aset tetap akan ditandatangani oleh *lessor* dengan *supplier* yang bersangkutan.
- k. *Supplier* mengirim aset tetap yang disewagunausaha kepada *lessee*.
- l. *Lessee* menandatangani tanda terima aset tetap dan menyerahkan kepada *supplier*.
- m. *Supplier* menyerahkan surat tanda terima serta bukti-bukti kepemilikan aset tetap kepada *lessor*.
- n. *Lessor* membayar harga perolehan aset tetap yang disewagunausaha kepada *supplier*.
- o. *Lessee* membayar sewa guna usaha (*lease fee*) secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak *leasing*.

4.3. Deskripsi Data yang Digunakan Dalam Melakukan Perbandingan Penghematan Pajak

Ketentuan yang diberikan oleh masing-masing alternatif pembelian berbeda-beda dan perlu dibuat agar hasil dari analisis menunjukkan perbandingan yang relevan. Tabel 4.1. memperlihatkan deskripsi data yang digunakan perusahaan dalam melakukan perbandingan penghematan pajak antara ketiga alternatif perolehan aset tetap.

**Tabel 4. 1 Deskripsi Data yang Digunakan Perusahaan dalam Melakukan
Perbandingan Penghematan Pajak**

Data	Alternatif Pembiayaan		
	Tunai	Kredit Bank	Leasing
Jenis barang	Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment	Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment	Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment
Jumlah	Satu unit	Satu unit	Satu unit
Harga perolehan	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.400.000.000,00
Umur Aset	8 tahun (UU PPh no. 36 2008)	8 tahun (UU PPh no. 36 2008)	8 tahun (UU PPh no. 36 2008)
Metode Penyusutan	Garis lurus	Garis lurus	Garis lurus
Besar pembiayaan ditanggung bank atau <i>lessor</i>		80% dari harga perolehan dan 20% sebagai simpanan pinjaman	80% dari harga perolehan dan 20% sebagai simpanan pinjaman
Bunga pinjaman bank/bunga <i>leasing</i>		9%	11%
Tingkat diskonto	9%	9%	9%
Beban asuransi	3% dari harga perolehan	3% dari harga perolehan	3% dari harga perolehan
Tarif pajak penghasilan	25% (UU Perpajakan pasal 29 2010)	25% (UU Perpajakan pasal 29 2010)	25% (UU Perpajakan pasal 29 2010)

Sumber: Internal Perusahaan

4.4. Analisis Hasil Pembahasan

4.4.1. Pembiayaan Aset Tetap Secara Langsung/Tunai

Perusahaan yang melakukan pembelian aset tetap secara tunai maka jumlah yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak adalah hanya sebesar biaya penyusutannya saja. Metode yang digunakan untuk menghitung besarnya biaya penyusutan adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat (umur ekonomis) adalah 8 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

$$\begin{aligned}\text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Tahun}} \\ \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Rp. 1.400.000.000,00}}{8 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp. 175.000.000,00/tahun}\end{aligned}$$

Besarnya biaya penyusutan per tahun untuk aset tetap dapat dilihat pada lampiran 1 di bagian akhir dari skripsi ini. Dikarenakan pembelian aset tetap tersebut secara tunai maka jumlah yang boleh dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah jumlah seluruh penyusutan aset tetap tersebut selama 8 tahun sebesar Rp 1.400.000.000,00 untuk satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment.

Pencatatan perolehan aset dengan pembelian langsung ini secara periodik adalah:

1/1/x1 Aset tetap.....Rp 1.400.000.000,00

Kas Rp 1.400.000.000,00

(untuk mencatat perolehan aset tetap secara tunai)

31/12/x1 Biaya penyusutan aset tetapRp 175.000.000,00

Akum. penyusutan aset tetap..... Rp 175.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun pertama)

31/12/x2 Biaya penyusutan aset tetapRp 175.000.000,00

Akum. penyusutan aset tetap..... Rp 175.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun kedua)

31/12/x3 Biaya penyusutan aset tetapRp 175.000.000,00

Akum. penyusutan aset tetap..... Rp 175.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun ketiga)

Jurnal penyusutan berikutnya sampai tahun ke-8 sesuai dengan lampiran 1 pada akhir skripsi ini.

4.4.2. Pembiayaan Aset Tetap Melalui Kredit Bank

Jika perusahaan melakukan pembelian aset tetap melalui kredit bank, maka jumlah yang boleh dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya penyusutan, biaya bunga atas pinjaman pada bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk penyelesaian administrasi kredit bank. Metode yang digunakan untuk menghitung besarnya biaya penyusutan adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat (umur ekonomis) untuk kendaraan adalah 8 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Biaya penyusutan per tahun untuk satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Tahun}} \\ \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Rp. 1.400.000.000,00}}{8 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp. 175.000.000,00/tahun} \end{aligned}$$

Besarnya biaya penyusutan per tahun untuk aset tetap secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2 di bagian akhir skripsi ini. Biaya penyusutan yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak adalah sebesar jumlah penyusutan aset tetap tersebut selama 8 tahun sebesar Rp 1.400.000.000,00.

Setelah menghitung besarnya biaya penyusutan per tahun, langkah berikutnya adalah menghitung besarnya pembayaran pinjaman yang harus dilakukan oleh PT."X" (debitur) setiap bulannya yang terdiri atas angsuran bunga dan angsuran pokok yang jumlahnya berubah-ubah. Kredit yang ditanggung oleh pihak bank atas pembelian aset tetap ini hanya sebesar 80% dari harga pokok aset tetap tersebut sehingga jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank adalah:

$$\text{Rp. 1.400.000.000,00} \times 80\% = \text{Rp 1.120.000.000,00}$$

Angsuran tiap periode yang harus dibayar oleh perusahaan kepada bank adalah:

$$\begin{aligned} PVAn &= A (PVIFAi, n) \\ \text{Rp 1.120.000.000,00} &= A \frac{1 - (1 + (0,09/12))^{-36}}{(0,09/12)} \\ \text{Rp 1.120.000.000,00} &= A \frac{1 - 0,76414896}{0,0075} \\ A &= \text{Rp. 35.615.700,49} \end{aligned}$$

Angsuran tiap periode yang harus dibayar perusahaan kepada bank adalah sebesar Rp 35.615.700,49 yang merupakan jumlah dari angsuran pokok dan angsuran bunganya. Bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada bank pada periode 1 adalah:

$$Rp\ 1.120.000.000,00 \times (0,09/12) = Rp\ 8.400.000,00$$

Besarnya angsuran bunga untuk periode berikutnya adalah sebesar $(0,09/12) \times$ sisa pinjaman periode sebelumnya.

Angsuran pokok periode 1 adalah besarnya angsuran/periode dikurangi angsuran bunga periode 1, yaitu:

$$Rp\ 35.615.700,49 - Rp\ 8.400.000,00 = Rp\ 27.215.700,49$$

Angsuran pokok pada periode berikutnya adalah besarnya angsuran/periode dikurangi angsuran bunga.

Sisa pinjaman adalah sebesar sisa pinjaman periode sebelumnya dikurangi angsuran pokok, untuk periode 1 yaitu:

$$Rp\ 1.120.000.000,00 - Rp\ 27.215.700,49 = Rp\ 1.092.784.299,51$$

Sampai akhir periode ke-36, jumlah angsuran/periode yang dibayar oleh perusahaan kepada bank adalah sebesar Rp 1.282.165.217,64 yang merupakan jumlah angsuran pokok sebesar Rp 1.119.999.996,33 ditambah dengan angsuran bunga sebesar Rp 162.165.221,31.

Pembayaran bunga yang dibayar oleh debitur semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok yang dapat dibebankan sebagai biaya. Perhitungan lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4 di bagian akhir skripsi ini. Total biaya

bunga secara nominal atas pinjaman pada bank ini adalah sebesar Rp 162.165.221,31 untuk satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment dan dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Selain biaya penyusutan dan biaya bunga atas pinjaman pada bank, biaya yang masih dapat dikurangkan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian administrasi kredit bank. Berikut ini adalah perincian biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk penyelesaian administrasi kredit bank meliputi pembayaran biaya asuransi dan biaya lain-lain pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Biaya Administrasi Kredit Bank

Rincian Biaya	Besar Biaya
Biaya asuransi	Rp 14.000.000,00
Biaya lain-lain	Rp 5.600.000,00
Jumlah	Rp 19.600.000,00

Sumber: Internal Perusahaan dan telah diolah kembali

Berdasarkan lampiran 2 dan lampiran 4 hingga tabel 4.2 diatas, maka jumlah yang boleh dibebankan sebagai biaya dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman 9% efektif adalah sebesar Rp 1.581.765.221,31 untuk satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment yang dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Jumlah Biaya yang Dibebankan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Biaya yang Dapat Dibebankan	Besar Biaya
Biaya penyusutan	Rp 1.400.000.000,00
Biaya bunga atas pinjaman pada bank	Rp 162.165.221,31
Biaya administrasi kredit bank	Rp 19.600.000,00
Jumlah	Rp 1.581.765.221,31

Sumber: Internal Perusahaan dan telah diolah kembali

Pencatatan untuk perolehan aset tetap dengan kredit bank secara periodik adalah sebagai berikut:

1/1/x1 Aset tetap Rp 1.400.000.000,00
 Hutang bankRp 1.400.000.000,00
 (untuk mencatat perolehan aset tetap dengan kredit pada bank)

31/1/x1 Hutang bank Rp 27.215.700,49
 Biaya bunga Rp 8.400.000,00
 Kas Rp 35.615.700,49
 (untuk mencatat pembayaran pada bank periode pertama)

28/2/x1 Hutang bank Rp 27.419.818,24
 Biaya bunga Rp 8.195.882,25
 Kas Rp 35.615.700,49
 (untuk mencatat pembayaran pada bank periode kedua)

31/3/x1 Hutang bank Rp 27.625.466,88
 Biaya bunga Rp 7.990.233,61
 Kas Rp 35.615.700,49
 (untuk mencatat pembayaran pada bank periode ketiga)

Jurnal pembayaran angsuran kredit bank dan bunga berikutnya sampai periode ke-36 sesuai dengan lampiran 4 pada akhir skripsi ini.

Aset tetap dibeli dalam keadaan siap pakai sehingga biaya bunga dianggap sebagai beban perusahaan. Besarnya aset tetap yang disusutkan adalah sebesar Rp 1.400.000.000,00.

Jurnal biaya penyusutan untuk tiap tahun adalah:

31/12/x1 Biaya penyusutan aset tetap Rp 175.000.000,00
 Akum. penyusutan aset tetap Rp 175.000.000,00
 (untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun pertama)

31/12/x2 Biaya penyusutan aset tetap Rp 175.000.000,00
 Akum. penyusutan aset tetap Rp 175.000.000,00
 (untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun kedua)

31/12/x3 Biaya penyusutan aset tetap Rp 175.000.000,00
 Akum. penyusutan aset tetap Rp 175.000.000,00
 (untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun ketiga)

Jurnal biaya penyusutan aset tetap dengan menggunakan kredit bank tahun berikutnya sampai tahun ke-8 sesuai dengan lampiran 2 pada akhir skripsi ini.

4.4.3. Pembiayaan Aset Tetap melalui Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Tingkat suku bunga *leasing* rata-rata adalah 10% diatas bunga pinjaman karena sebagian besar perusahaan *leasing* sumber dananya berasal dari pinjaman bank. Jika perusahaan melakukan pembelian aset tetap melalui sewa guna usaha (*Leasing*), maka semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha (*lease fee*) ditambah biaya administrasi sewa guna usaha (*leasing*), yang meliputi pembayaran biaya asuransi dan biaya lain-lain dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

Berikut ini adalah besarnya pembayaran sewa guna usaha (*lease fee*) yang harus dilakukan oleh PT."X" (*lessee*) setiap bulannya yang terdiri atas angsuran bunga dan angsuran pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo pokok yang dapat dilihat pada lampiran 5 di bagian akhir skripsi ini untuk perhitungan yang lebih lengkap.

Jumlah angsuran yang dibayar tiap periode kepada *lessor* berdasarkan perhitungan pada lampiran 5 adalah sebesar Rp 36.667.376,51 yang merupakan jumlah dari angsuran pokok dan angsuran bunga dibayar setiap periode. Besarnya biaya bunga pada periode 1 adalah:

$$Rp\ 1.120.000.000,00 \times (0,11/12) = Rp\ 10.266.666.67$$

Pada periode berikutnya, besarnya angsuran bunga adalah sebesar $(0,11/12) \times$ sisa pinjaman periode sebelumnya.

Untuk mengetahui angsuran pokok, angsuran/periode sebelumnya dikurangi dengan angsuran bunga sehingga angsuran pokok periode 1 adalah:

$$Rp\ 36.667.376,51 - Rp\ 10.266.666,67 = Rp\ 26.400.709,84$$

Sisa pinjaman adalah sebesar sisa pinjaman periode sebelumnya dikurangi dengan angsuran pokok, sehingga untuk periode 1 sisa pinjamannya adalah:

$$Rp\ 1.120.000.000,00 - Rp\ 26.400.709,84 = Rp\ 1.093.599.290,16$$

Sampai akhir periode ke-36, jumlah angsuran/periode yang dibayar perusahaan (*lessee*) kepada pihak *lessor* adalah sebesar Rp 1.320.025.554,36 yang merupakan jumlah angsuran pokok sebesar Rp 1.120.000.565,88 ditambah angsuran bunga selama 36 periode sebesar Rp 200.024.988,48. Total *lease fee* secara nominal adalah Rp 1.320.025.554,36 untuk satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment yang dapat diakui sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Selain semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha (*lease fee*), biaya yang masih dapat dikurangkan adalah biaya administrasi sewa guna usaha (*leasing*). Berikut ini adalah perincian biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan untuk penyelesaian administrasi sewa guna usaha (*leasing*) meliputi pembayaran biaya asuransi dan biaya lain-lain terdapat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Biaya Administrasi Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Rincian Biaya	Besar Biaya
Biaya asuransi	Rp 14.000.000,00
Biaya lain-lain	Rp 5.600.000,00
Jumlah	Rp 19.600.000,00

Sumber: Internal perusahaan dan telah diolah kembali

Perlakuan pajak penghasilan bagi *lessee* ditentukan bahwa selama masa sewa guna usaha *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas aset tetap yang disewagunausahakan. Penyusutan baru dapat dilakukan setelah *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli aset tetap tersebut dengan dasar penyusutannya adalah sebesar nilai sisa (*residual value*) dari aset tetap yang bersangkutan. Nilai residual menurut ketentuan fiskus adalah nilai aset tetap pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh *lessor* dan *lessee* pada awal masa sewa guna usaha sehingga besarnya nilai sisa (*residual value*) sama dengan simpanan jaminan yaitu 20% dari harga perolehan aset tetap.

Setelah mengambil alih aset tetap yang disewa guna usaha dengan hak opsi, metode yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dan masa manfaat (umur ekonomis) adalah 8 tahun untuk kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Besarnya biaya penyusutan per tahun aset tetap adalah sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Tahun}} \\ \text{Penyusutan} &= \frac{\text{Rp } 280.000.000,00}{8 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp } 35.000.000,00/\text{tahun} \end{aligned}$$

Biaya penyusutan sebesar Rp 35.000.000,00 baru bisa disusutkan pada tahun keempat karena masa sewa guna usaha (*leasing*) masih berjalan sampai tahun ketiga. Biaya penyusutan yang dapat dibiayakan dalam penghitungan penghasilan kena pajak sebesar Rp 280.000.000,00 untuk satu unit kendaraan Bulldozer

Komatsu D85-SS Heavy Equipment yang dapat dilihat secara lengkap pada lampiran 3 di bagian akhir skripsi ini.

Berdasarkan lampiran 3 dan lampiran 5 hingga tabel 4.4 di atas, maka jumlah yang dapat dibebankan sebagai biaya dengan menggunakan tingkat bunga *leasing* 11% efektif adalah sebesar Rp 1.619.625.554,36 untuk satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment yang dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Jumlah Biaya yang Dibebankan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Biaya yang Dapat Dibebankan	Besar Biaya
<i>Lease fee</i>	Rp 1.320.025.554,36
Biaya administrasi sewa guna usaha (<i>leasing</i>)	Rp 19.600.000,00
Biaya penyusutan sebesar nilai sisa	Rp 280.000.000,00
Jumlah	Rp 1.619.625.554,36

Sumber: Internal Perusahaan dan telah diolah kembali

Pencatatan perolehan aset tetap dengan cara *leasing* adalah:

1/1/x1 *Security deposit*..... Rp 280.000.000,00

Kas Rp 280.000.000,00

(untuk mencatat jaminan yang harus dibayar oleh *lessee*)

1/1/x1 Aset tetap *leasing*..... Rp 1.320.025.554,36

Hutang *leasing*..... Rp 1.320.025.554,36

(untuk mencatat timbulnya hutang aset tetap *leasing*)

31/1/x1	Hutang <i>leasing</i>	Rp 26.400.709,84
	Bunga <i>leasing</i>	Rp 10.266.666,67
	Kas	Rp 36.667.376,51
	(untuk mencatat pembayaran <i>leasing</i> periode pertama)	
28/2/x1	Hutang <i>leasing</i>	Rp 26.642.716,35
	Bunga <i>leasing</i>	Rp 10.024.660,16
	Kas	Rp 36.667.376,51
	(untuk mencatat pembayaran <i>leasing</i> periode kedua)	
31/3/x1	Hutang <i>leasing</i>	Rp 26.886.941,25
	Bunga <i>leasing</i>	Rp 9.780.435,26
	Kas	Rp 36.667.376,51
	(untuk mencatat pembayaran <i>leasing</i> periode ketiga)	

Jurnal biaya *leasing* pada periode berikutnya sampai periode ke-36 sesuai dengan lampiran 5 pada bagian akhir skripsi ini.

Biaya penyusutan oleh *lessee* baru boleh dilakukan pada saat berakhirnya masa *leasing* yaitu pada tahun keempat dan besarnya penyusutan yang boleh diakui sebagai biaya adalah sebesar nilai sisa.

31/12/x1	Biaya penyusutan aset tetap	Rp 35.000.000,00
	Akum. penyusutan aset tetap.....	Rp 35.000.000,00
	(untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun ke-4)	

31/12/x2 Biaya penyusutan aset tetap Rp 35.000.000,00

Akum. penyusutan aset tetap..... Rp 35.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun ke-5)

31/12/x3 Biaya penyusutan aset tetap Rp 35.000.000,00

Akum. penyusutan aset tetap..... Rp 35.000.000,00

(untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap tahun ke-6)

Jurnal biaya penyusutan aset tetap tahun berikutnya sampai dengan tahun ke-8 sesuai dengan lampiran 3 pada akhir skripsi ini.

4.4.4. Analisis Alternatif Pembiayaan yang Sebaiknya Dipilih Perusahaan dalam Menghemat Pajak

Pemilihan terhadap alternatif pembiayaan aset tetap untuk satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment guna mendapatkan penghematan pajak akan dilakukan pada alternatif yang memiliki *deductible expense* paling besar. Hal ini dikarenakan komponen *deductible expense* yang maksimum mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak menjadi berkurang sehingga Pajak Penghasilan pun menjadi kecil.

Sebelum menentukan alternatif pembiayaan mana yang sebaiknya dipilih sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memperoleh aset tetap secara tunai, kredit bank, atau *leasing*, terlebih dahulu penulis akan melakukan perhitungan dampak atau pengaruh biaya yang dapat dikurangkan untuk masing-masing alternatif pilihan transaksi aset tetap terhadap pajak penghasilan yang dapat

dihemat oleh perusahaan. Perhitungan dampak atau pengaruh biaya yang dapat dikurangkan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 6 hingga lampiran 8 bagian akhir skripsi ini, sehingga jumlah biaya untuk masing-masing alternatif pembiayaan asset tetap satu uni kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment dapat dilihat pada table 4.6 berikut.

**Tabel 4. 6 Jumlah Biaya yang Dibebankan Setiap Alternatif Pembiayaan
Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak**

Tunai	Kredit 9%	Leasing 11%
Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.581.765.221,31	Rp 1.619.625.554,36

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada lampiran 6 hingga lampiran 8 dapat dilihat bahwa dampak atau pengaruh biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak untuk alternatif pembiayaan melalui sewa guna usaha (*leasing*) lebih besar diantara ketiga alternatif pembiayaan tersebut. Hal ini dikarenakan pengaruh biaya yang dapat dikurangkan untuk alternatif pembiayaan melalui leasing diantaranya angsuran pokok dan biaya bunga (*lease fee*), biaya administrasi, dan biaya penyusutan sebesar nilai sisa (*residual value*) dapat dibiayakan, sedangkan untuk alternatif pembiayaan melalui kredit bank yang dapat dibiayakan hanya biaya penyusutan, biaya administrasi, dan biaya bunga atas pinjaman pada bank saja dan juga untuk alternatif pembelian secara tunai hanya biaya penyusutan saja yang dapat dibiayakan. Disamping itu masa sewa guna usaha (*lease term*) lebih pendek dari masa manfaat (umur

ekonomis) sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dan akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan yang dapat dihemat oleh perusahaan.

Jumlah pajak penghasilan yang dapat dihemat perusahaan untuk alternatif pembiayaan secara tunai dengan tingkat *discount rate* 9% adalah Rp 350.000.000,00 dan total nilai tunai (*present value*) penghematan pajaknya adalah Rp 242.156.250,00 yang dapat dilihat pada lampiran 6 bagian akhir skripsi ini. Jumlah pajak penghasilan yang dapat dihemat perusahaan untuk alternatif pembiayaan kredit bank dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman 9% dan *discount rate* 9% adalah sebesar Rp 395.441.305,33 dan total nilai tunai (*present value*) penghematan pajaknya adalah Rp 282.476.884,95 yang dapat dilihat pada lampiran 7 bagian akhir skripsi ini. Jumlah pajak penghasilan yang dapat dihemat perusahaan untuk alternatif pembiayaan kredit bank dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman 11% dan *discount rate* 9% adalah sebesar Rp 404.906.388,59 dan total nilai tunai (*present value*) penghematan pajaknya adalah Rp 320.756.015,69 yang dapat dilihat pada lampiran 8 bagian akhir skripsi ini.

Jika perusahaan menggunakan alternatif pembiayaan melalui sewa guna usaha (*leasing*) akan lebih menguntungkan daripada pembiayaan melalui kredit bank karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan untuk alternatif ini lebih besar sejumlah Rp 38.279.130,74 untuk pembelian satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment dibandingkan dengan alternatif pembiayaan melalui kredit bank, sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan

bagi perusahaan apabila memilih alternatif pembiayaan melalui sewa guna usaha (*leasing*) sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perolehan aset tetap. Dapat dilihat juga antara alternatif pembiayaan secara tunai dengan alternatif pembiayaan secara sewa guna usaha (*leasing*) lebih menguntungkan jika perusahaan menggunakan alternatif pembiayaan secara sewa guna usaha (*leasing*) karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan untuk alternatif ini lebih besar sejumlah Rp 78.599.765,69 untuk pembelian satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment dibandingkan dengan alternatif pembiayaan secara tunai. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 di bawah ini dan untuk perhitungan *present value* dapat dilihat pada lampiran 6 sampai dengan lampiran 8 pada bagian akhir skripsi ini.

Tabel 4. 7 Perbandingan Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan Dalam Pembiayaan Secara Tunai, Kredit Bank, dan *Leasing*

	Tunai	Kredit 9%	<i>Leasing</i> 11%
Harga perolehan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Biaya yang boleh dikurangkan			
Biaya penyusutan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	280.000.000,00
Biaya bunga Pinjaman/ <i>lease</i> <i>payment</i>		162.165.221,31	1.320.025.554,36
Biaya administrasi		19.600.000,00	19.600.000,00
Jumlah	1.400.000.000,00	1.581.765.221,31	1.619.625.554,36
PPH 25%	350.000.000,00	395.441.305,33	404.906.388,59
PV (Disc rate 9%)	242.156.250,00	282.476.884,95	320.756.015,69

Tabel 4. 8 Perbandingan Penghematan Pajak Dalam Pembiayaan Secara Tunai, Kredit Bank, dan *Leasing*

<i>Leasing</i> vs Tunai		Penghematan Pajak
<i>Leasing</i> 11%	Tunai	
320.756.015,69	242.156.250,00	78.599.765,69
<i>Leasing</i> vs Kredit		Penghematan Pajak
<i>Leasing</i> 11%	Kredit 9%	
320.756.015,69	282.476.884,95	38.279.130,74
Kredit vs Tunai		Penghematan Pajak
kredit 9 %	Tunai	
282.476.884,95	242.156.250,00	40.320.634,95

Dalam mengambil keputusan pembiayaan mana yang paling menguntungkan ditinjau dari aspek perpajakannya, perusahaan lebih baik melihat dari besarnya *present value* (nilai sekarang) karena dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang jatuh tempo dalam periode adalah jumlah yang jika berada di tangan sekarang, dapat berkembang menjadi sama di masa depan. Jika ditarik garis waktu ke saat sekarang sebenarnya perusahaan memperoleh penghematan pajak yang besar dengan memilih alternatif *leasing*. Pembuktian diatas diperoleh kesimpulan bahwa suku bunga *leasing* yang pada umumnya lebih tinggi daripada suku bunga kredit bank tidak mempengaruhi besarnya pajak karena *leasing* menunjukkan penghematan pajak yang besar secara *present value* sehingga bisa dipertimbangkan perusahaan untuk dipilih sebagai alternatif pembiayaan yang

terhemat dipandang dari aspek perpajakan. Hal itu disebabkan karena adanya peraturan yang lebih menguntungkan *leasing* yaitu semua *lease fee* (angsuran pokok dan biaya bunga), biaya administrasi, dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi menjadi beban dalam laporan keuangan fiskal, sedangkan dalam kredit bank hanya biaya bunga, biaya administrasi, dan biaya penyusutan yang boleh dibebankan dan juga pembelian langsung tunai hanya biaya penyusutan yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal, sehingga dengan memanfaatkan adanya peraturan tersebut maka biaya-biaya akan semakin besar untuk dapat dibebankan mengakibatkan jumlah pajak yang akan dibayar dapat diminimalkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kuantitatif, dimana analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis perbandingan tiga alternatif cara pembiayaan aset tetap pada PT."X", sedangkan penelitian kuantitatif dilakukan dengan menghitung perbandingan penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan diantara ketiga alternatif pembiayaan aset tetap secara tunai, kredit bank, dan *leasing*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Alternatif pembiayaan melalui *Leasing* memiliki penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan melalui kredit bank dan tunai. Hal ini dapat dilihat dari penghematan pajak yang diperoleh atas pembelian satu unit kendaraan Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment antara pembiayaan tunai dan *leasing* adalah sebesar Rp 78.599.765,69, pembiayaan kredit bank dan *leasing* penghematan pajaknya sebesar Rp 38.279.130,74, dan pembiayaan secara kredit bank dan tunai penghematan pajaknya adalah Rp 40.320.634,95.
- b. Alternatif pembiayaan aset tetap melalui sewa guna usaha (*leasing*) merupakan alternatif yang paling menguntungkan karena penghematan pajak yang diperoleh perusahaan untuk alternatif ini lebih besar dibandingkan

alternatif pembiayaan secara tunai dan alternatif pembiayaan melalui kredit bank. Jumlah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*) perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk alternatif pembiayaan melalui leasing lebih besar diantaranya angsuran pokok dan biaya bunga (*lease fee*), biaya administrasi, biaya penyusutan dan secara present value pun leasing memiliki nominal penghematan pajak yang besar dibandingkan alternatif pembiayaan lainnya, sedangkan alternatif pembiayaan melalui kredit bank diantaranya biaya bunga, biaya penyusutan, dan biaya administrasi yang dapat dibiayakan, dan untuk alternatif pembiayaan tunai yang dapat dibiayakan hanya biaya penyusutan, sehingga akan lebih menguntungkan bagi perusahaan jika memilih alternatif pembiayaan melalui sewa guna usaha (*leasing*) sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memperoleh aset tetap.

5.2. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya peraturan perpajakan yang mengatur tentang biaya apa saja yang dapat dijadikan sebagai beban dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak baik secara tunai, kredit bank, maupun *leasing*, perusahaan dapat memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku tersebut untuk membuat strategi-strategi tertentu yang merupakan bagian dari perencanaan pajak, sehingga dapat meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba bersih perusahaan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data pembelian mencakup pembelian satu jenis aset tetap pada PT. "X" tahun 2014.
2. Data yang diambil merupakan data yang berkaitan dengan transaksi pembelian satu jenis aset tetap pada PT."X".
3. Pada alternatif pembiayaan *leasing* hanya membahas *financial lease*, sedangkan *operating lease* tidak.

5.4. Saran

1. Perusahaan sebaiknya memilih alternatif pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memperoleh aset tetap dibandingkan dengan alternatif pembiayaan secara tunai maupun kredit bank. Selain penghematan pajaknya yang besar, sewa guna usaha (*leasing*) menggunakan suku bunga yang tetap sehingga perusahaan tidak terganggu dengan fluktuasi suku bunga yang berlaku di pasar.
2. Sewa guna usaha (*leasing*) memungkinkan pengoptimalan dana investasi barang modal dapat dialihkan untuk investasi hasil cepat lainnya, misalnya modal kerja atau investasi surat-surat berharga. Sewa guna usaha (*leasing*) juga dianggap lebih mempunyai nilai fleksibilitas dalam struktur kontrak

sehingga dapat dilakukan beberapa pembaharuan perjanjian yang dianggap masih menguntungkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, Jessica. 2012. Perbandingan antara Pembelian Tunai, Kredit Bank, dan *Leasing* Ditinjau dari Aspek Perpajakan pada PT."X".
- Hariyani, Iswi dan Serfianto D.P. 2011. *Gebyar Bisnis Dengan Cara Leasing*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Irwan. 2012. Analisa Komparasi Kredit Bank Versus *Financial Leasing* untuk Mengefisiensikan Beban Pajak Atas Perolehan Aktiva Tetap (Studi Kasus di Perusahaan Percetakan).
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kieso, Weygandt and Warfield. 2001. *Intermediate Accounting*, New York: Wiley and Sons.
- Lumbantoruan, Sophar. 1999. *Akuntansi Pajak* (Edisi Kedua), Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan* (Edisi Revisi), Yogyakarta: Andi.
- Melani, Dwi. 2003. Analisa Perbandingan Penghematan Pajak Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Memperoleh Aktiva Tetap Melalui *Leasing* atau Kredit Bank pada UD."X".
- Natania. 2004. Perencanaan Pajak dalam Pengambilan Keputusan untuk Perolehan Aktiva Tetap Melalui Pembiayaan secara Tunai, Kredit Bank, dan *Leasing* pada PT."X".
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, Antarestia Kartika dan Jimmy Andrianus. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak dalam Keputusan Pembelian *Mixer truck* Kaitannya dengan Penghematan Pajak (Studi Kasus pada PT. Duta Bangsa Mandiri, Pasuruan).
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. 2014. *Perpajakan Indonesia* (Edisi Revisi Ketiga), Jakarta: Indeks.

Susilo, Y.S., Triandara, Sigit & Santoso, A.T. Budi. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Edisi 1), Yogyakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

www.duniapajak.com

www.ortax.com

www.pajak.go.id

Biaya Penyusutan Kendaraan 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara Tunai

Harga Perolehan : Rp 1.400.000.000,00

Masa Manfaat : 8 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Tarif Penyusutan : 12,5%

Tahun	Nilai Buku	Biaya Penyusutan	Saldo
1	1.400.000.000,00	175.000.000,00	1.225.000.000,00
2	1.225.000.000,00	175.000.000,00	1.050.000.000,00
3	1.050.000.000,00	175.000.000,00	875.000.000,00
4	875.000.000,00	175.000.000,00	700.000.000,00
5	700.000.000,00	175.000.000,00	525.000.000,00
6	525.000.000,00	175.000.000,00	350.000.000,00
7	350.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
8	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
		1.400.000.000,00	

Biaya Penyusutan Kendaraan 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara Kredit Bank

Harga Perolehan : Rp 1.400.000.000,00

Masa Manfaat : 8 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Tarif Penyusutan : 12,5%

Tahun	Nilai Buku	Biaya Penyusutan	Saldo
1	1.400.000.000,00	175.000.000,00	1.225.000.000,00
2	1.225.000.000,00	175.000.000,00	1.050.000.000,00
3	1.050.000.000,00	175.000.000,00	875.000.000,00
4	875.000.000,00	175.000.000,00	700.000.000,00
5	700.000.000,00	175.000.000,00	525.000.000,00
6	525.000.000,00	175.000.000,00	350.000.000,00
7	350.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
8	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
		1.400.000.000,00	

Lampiran 3**Biaya Penyusutan Kendaraan 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara *Leasing***

Nilai sisa: Rp 280.000.000,00

Masa Manfaat : 8 Tahun

Metode Penyusutan : Garis Lurus

Tarif Penyusutan : 12,5%

Tahun	Nilai Buku	Biaya Penyusutan	Saldo
tahun 1-3 tidak ada penyusutan karena <i>leasing</i>			
4	280.000.000,00	35.000.000,00	245.000.000,00
5	245.000.000,00	35.000.000,00	210.000.000,00
6	210.000.000,00	35.000.000,00	175.000.000,00
7	175.000.000,00	35.000.000,00	140.000.000,00
8	140.000.000,00	35.000.000,00	105.000.000,00
9	105.000.000,00	35.000.000,00	70.000.000,00
10	70.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
11	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
		280.000.000,00	

Lampiran 4

Skedul Pembayaran Pinjaman Kendaraan
1 (satu) Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment

Jenis Aset: Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment
Jumlah Pinjaman: Rp 1.120.000.000,00

Jangka Waktu: 3 Tahun
Tingkat Bunga Efektif: 9%

Periode Angsuran	Angsuran per Bulan	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Sisa Pinjaman
0		0,00	0,00	1.120.000.000,00
1	35.615.700,49	27.215.700,49	8.400.000,00	1.092.784.299,51
2	35.615.700,49	27.419.818,24	8.195.882,25	1.065.364.481,27
3	35.615.700,49	27.625.466,88	7.990.233,61	1.037.739.014,39
4	35.615.700,49	27.832.657,88	7.783.042,61	1.009.906.356,50
5	35.615.700,49	28.041.402,82	7.574.297,67	981.864.953,69
6	35.615.700,49	28.251.713,34	7.363.987,15	953.613.240,35
7	35.615.700,49	28.463.601,19	7.152.099,30	925.149.639,16
8	35.615.700,49	28.677.078,20	6.938.622,29	896.472.560,97
9	35.615.700,49	28.892.156,28	6.723.544,21	867.580.404,68
10	35.615.700,49	29.108.847,45	6.506.853,04	838.471.557,23
11	35.615.700,49	29.327.163,81	6.288.536,68	809.144.393,42
12	35.615.700,49	29.547.117,54	6.068.582,95	779.597.275,88
13	35.615.700,49	29.768.720,92	5.846.979,57	749.828.554,96
14	35.615.700,49	29.991.986,33	5.623.714,16	719.836.568,63
15	35.615.700,49	30.216.926,23	5.398.774,26	689.619.642,40
16	35.615.700,49	30.443.553,17	5.172.147,32	659.176.089,23
17	35.615.700,49	30.671.879,82	4.943.820,67	628.504.209,41
18	35.615.700,49	30.901.918,92	4.713.781,57	597.602.290,49
19	35.615.700,49	31.133.683,31	4.482.017,18	566.468.607,18
20	35.615.700,49	31.367.185,94	4.248.514,55	535.101.421,25
21	35.615.700,49	31.602.439,83	4.013.260,66	503.498.981,41
22	35.615.700,49	31.839.458,13	3.776.242,36	471.659.523,29
23	35.615.700,49	32.078.254,07	3.537.446,42	439.581.269,22
24	35.615.700,49	32.318.840,97	3.296.859,52	407.262.428,25
25	35.615.700,49	32.561.232,28	3.054.468,21	374.701.195,97
26	35.615.700,49	32.805.441,52	2.810.258,97	341.895.754,45
27	35.615.700,49	33.051.482,33	2.564.218,16	308.844.272,12
28	35.615.700,49	33.299.368,45	2.316.332,04	275.544.903,67
29	35.615.700,49	33.549.113,71	2.066.586,78	241.995.789,96
30	35.615.700,49	33.800.732,07	1.814.968,42	208.195.057,89
31	35.615.700,49	34.054.237,56	1.561.462,93	174.140.820,34
32	35.615.700,49	34.309.644,34	1.306.056,15	139.831.176,00
33	35.615.700,49	34.566.966,67	1.048.733,82	105.264.209,33
34	35.615.700,49	34.826.218,92	789.481,57	70.437.990,41
35	35.615.700,49	35.087.415,56	528.284,93	35.350.574,85
36	35.615.700,49	35.350.571,18	265.129,31	0,00
	1.282.165.217,64	1.119.999.996,33	162.165.221,31	

Lampiran 5

Skedul Pembayaran Sewa Guna Usaha Kendaraan
1 (satu) Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment

Jenis Aset: Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment
Simpanan Jaminan: Rp 280.000.000,00
Angsuran Pokok Pembiayaan: Rp 1.120.000.000,00
Masa Sewa Guna Usaha: 3 Tahun
Tingkat Bunga Efektif: 11%

Periode Angsuran	Angsuran Perbulan	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Sisa Pinjaman
0		0,00	0,00	1.120.000.000,00
1	36.667.376,51	26.400.709,84	10.266.666,67	1.093.599.290,16
2	36.667.376,51	26.642.716,35	10.024.660,16	1.066.956.573,81
3	36.667.376,51	26.886.941,25	9.780.435,26	1.040.069.632,56
4	36.667.376,51	27.133.404,88	9.533.971,63	1.012.936.227,68
5	36.667.376,51	27.382.127,76	9.285.248,75	985.554.099,92
6	36.667.376,51	27.633.130,59	9.034.245,92	957.920.969,33
7	36.667.376,51	27.886.434,29	8.780.942,22	930.034.535,04
8	36.667.376,51	28.142.059,94	8.525.316,57	901.892.475,10
9	36.667.376,51	28.400.028,82	8.267.347,69	873.492.446,28
10	36.667.376,51	28.660.362,42	8.007.014,09	844.832.083,86
11	36.667.376,51	28.923.082,41	7.744.294,10	815.909.001,45
12	36.667.376,51	29.188.210,66	7.479.165,85	786.720.790,79
13	36.667.376,51	29.455.769,26	7.211.607,25	757.265.021,52
14	36.667.376,51	29.725.780,48	6.941.596,03	727.539.241,05
15	36.667.376,51	29.998.266,80	6.669.109,71	697.540.974,24
16	36.667.376,51	30.273.250,91	6.394.125,60	667.267.723,33
17	36.667.376,51	30.550.755,71	6.116.620,80	636.716.967,62
18	36.667.376,51	30.830.804,31	5.836.572,20	605.886.163,31
19	36.667.376,51	31.113.420,01	5.553.956,50	574.772.743,30
20	36.667.376,51	31.398.626,36	5.268.750,15	543.374.116,94
21	36.667.376,51	31.686.447,10	4.980.929,41	511.687.669,83
22	36.667.376,51	31.976.906,20	4.690.470,31	479.710.763,63
23	36.667.376,51	32.270.027,84	4.397.348,67	447.440.735,78
24	36.667.376,51	32.565.836,43	4.101.540,08	414.874.899,35
25	36.667.376,51	32.864.356,60	3.803.019,91	382.010.542,75
26	36.667.376,51	33.165.613,20	3.501.763,31	348.844.929,55
27	36.667.376,51	33.469.631,32	3.197.745,19	315.375.298,23
28	36.667.376,51	33.776.436,28	2.890.940,23	281.598.861,95
29	36.667.376,51	34.086.053,61	2.581.322,90	247.512.808,34
30	36.667.376,51	34.398.509,10	2.268.867,41	213.114.299,24
31	36.667.376,51	34.713.828,77	1.953.547,74	178.400.470,48
32	36.667.376,51	35.032.038,86	1.635.337,65	143.368.431,61
33	36.667.376,51	35.353.165,89	1.314.210,62	108.015.265,73
34	36.667.376,51	35.677.236,57	990.139,94	72.338.029,15
35	36.667.376,51	36.004.277,91	663.098,60	36.333.751,24
36	36.667.376,51	36.334.317,12	333.059,39	0,00
	1.320.025.554,36	1.120.000.565,88	200.024.988,48	

Lampiran 6

**Dampak atau Pengaruh Biaya yang dapat dikurangkan serta Penghematan Pajak yang diperoleh PT."X"
untuk alternatif Pembelian Kendaraan 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment secara Tunai**

Tahun	Biaya Penyusutan	Jumlah	PPh 25%	Discount Factor	Present Value Penghematan Pajak
0				1,0000	
1	175.000.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	0,9174	40.136.250,00
2	175.000.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	0,8417	36.824.375,00
3	175.000.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	0,7723	33.788.125,00
4	175.000.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	0,7084	30.992.500,00
5	175.000.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	0,6499	28.433.125,00
6	175.000.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	0,5963	26.088.125,00
7	175.000.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	0,5471	23.935.625,00
8	175.000.000,00	175.000.000,00	43.750.000,00	0,5019	21.958.125,00
	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	350.000.000,00		242.156.250,00

Lampiran 7

Dampak atau Pengaruh Biaya yang Dapat Dikurangkan serta Penghematan Pajak yang Diperoleh PT."X"
Untuk Alternatif Pembelian Kendaraan 1 (satu) Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara Kredit Bank

Tahun	Biaya Penyusutan	Biaya Bunga Pinjaman	Biaya Administrasi	Jumlah	PPh 25%	Discount Factor	Present Value Penghematan Pajak
0			19.600.000,00	19.600.000,00	4.900.000,00	1,0000	4.900.000,00
1	175.000.000,00	86985682		261.985.681,76	65.496.420,44	0,9174	60.086.416,11
2	175.000.000,00	55.053.558,25		230.053.558,25	57.513.389,56	0,8417	48.409.019,99
3	175.000.000,00	20.125.981,30		195.125.981,30	48.781.495,33	0,7723	37.673.948,84
4	175.000.000,00			175.000.000,00	43.750.000,00	0,7084	30.992.500,00
5	175.000.000,00			175.000.000,00	43.750.000,00	0,6499	28.433.125,00
6	175.000.000,00			175.000.000,00	43.750.000,00	0,5963	26.088.125,00
7	175.000.000,00			175.000.000,00	43.750.000,00	0,5471	23.935.625,00
8	175.000.000,00			175.000.000,00	43.750.000,00	0,5019	21.958.125,00
	1.400.000.000,00	162.165.221,31	19.600.000,00	1.581.765.221,31	395.441.305,33		282.476.884,95

Lampiran 8

Dampak atau Pengaruh Biaya yang Dapat Dikurangkan serta Penghematan Pajak yang diperoleh PT."X"
Untuk Alternatif Pembelian Kendaraan 1 (satu) Unit Bulldozer Komatsu D85-SS Heavy Equipment Secara *Leasing*

Tahun	<i>Lease Payment</i>	Biaya Administrasi	Biaya Penyusutan sebesar Nilai Sisa	Jumlah	PPH 25%	<i>Discount Factor</i>	<i>Present Value Penghematan Pajak</i>
0		19.600.000,00		19.600.000,00	4.900.000,00	1,0000	4.900.000,00
1	440.008.518,12			440.008.518,12	110.002.129,53	0,9174	100.915.953,63
2	440.008.518,12			440.008.518,12	110.002.129,53	0,8417	92.588.792,43
3	440.008.518,12			440.008.518,12	110.002.129,53	0,7723	84.954.644,64
4			35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	0,7084	6.198.500,00
5			35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	0,6499	5.686.625,00
6			35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	0,5963	5.217.625,00
7			35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	0,5471	4.787.125,00
8			35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	0,5019	4.391.625,00
9			35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	0,4604	4.028.500,00
10			35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	0,4224	3.696.000,00
11			35.000.000,00	35.000.000,00	8.750.000,00	0,3875	3.390.625,00
	1.320.025.554,36	19.600.000,00	280.000.000,00	1.619.625.554,36	404.906.388,59		320.756.015,69